

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks
Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
Tahun 2010-2017**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Ainun Mardiyah
Nomor Mahasiswa : 15313088
Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA

2019

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks
Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
Tahun 2010-2017**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar
sarjana jenjang strata 1
Program Studi Ilmu Ekonomi,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Ainun Mardiyah
Nomor Mahasiswa : 15313088
Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2019

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL', the alphanumeric code 'E160EAPF58547180', the value '6000', and 'ENAM RIBURUPIAH'. There is also a small emblem on the right side of the stamp.

AINUN MARDIYAH

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA JAMBI
TAHUN 2010-2017

Nama : Ainun Mardiyah
Nomor Mahasiswa : 15313088
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 15 Januari 2019

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Ainun Mardiyah
15/1/2019

Unggul Priyadi
Unggul Priyadi, Dr., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAMBI TAHUN 2010-2017**

Disusun Oleh : **AINUN MARDIYAH**

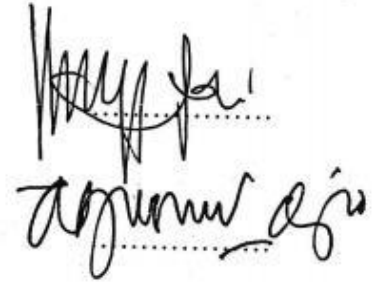
Nomor Mahasiswa : **15313088**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 20 Februari 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Unggul Priyadi, Dr., M.Si.

Penguji : Agus Widarjono, SE., MA., Ph.D



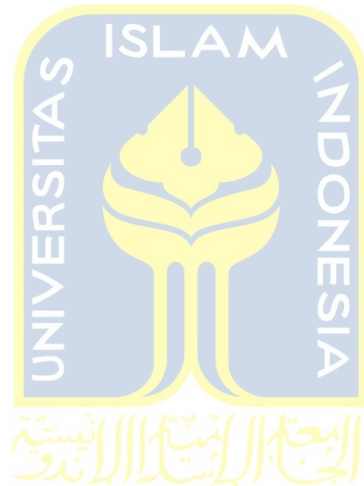
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sfiyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN MOTTO

- Allah SWT tempat untuk bersujud
- Ridho kedua orang tua kunci dari kesuksesan
- Tidak untuk menunda hari esok jika ingin berhasil
- Dan bekerja keraslah karena usahamu tidak akan mengkhianati kesuksesanmu.



HALAMAN PERSEMBAHAN



Untuk sebuah persembahkan atas rasa Syukur dan kenikmatan dari Allah S.W.T
penulis persembahkan Skripsi Untuk:

1. Bapak Rudi Saptono dan Ibu Safrida Tercinta Atas segalanya yang telah diberikan kepada saya hingga saat ini, untuk segala doa dan pengorbanan kalian. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya.
2. Ayah Anas Harahap dan Umi Sri Suwarni yang telah mendoakan saya selama kuliah dan terimakasih atas nasehat-nasehat yang kalian berikan.
3. Sahabat terbaik selama kuliah Meilina, Zalfa Zahiyah, Nurkholifatul Aula, Ghea Rizki Annisa Yuliati Nerdha, Rezal HadiWinanto. Terimakasih sudah membantu selama diperkuliahan.
4. Semua orang yang selalu menjadi sahabat terbaik dalam hidup saya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2017. Sebagai salah satu syarat kelulusan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, penulis akan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penullis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan perlindungan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta Ayah Rudi Saptono dan Ibu Safrida, yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan doa, semangat, dorongan, nasehat, kasih sayang dan pengorbanan yang tidak pernah tergantikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Unggul Priyadi,Dr.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu di Univeritas Islam Indonesia.

5. Muhammad Syahrul Hafiz, Adli Akbar, Muhammad Rizki Fadillah adik
tercinta yang selalu memotivasi, mendukung, dan mendoakan.
6. Fazli Nugraha Tambunan, yang selalu memotivasi, dan mendukung.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Judul Skripsi	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Berita Acara Tugas Akhir/Skripsi	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar.....	viii
Halaman Daftar Isi.....	x
Halaman Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Kajian Pustaka	14
2.2 Landasan Teori	17
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia	17
2.2.2 Pengaruh PDRB Terhadap IPM.....	20

2.2.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap IPM.....	22
2.2.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan Terhadap IPM	25
2.2.5 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan Terhadap IPM.....	26
2.2.6 Pengaruh Belanja Modal Terhadap IPM.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran	27
2.4 Hipotesisi Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Dan Pengumpulan Data	29
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	30
3.2.1 Variabel Dependen (Y)	30
3.2.2 Variabel Independen (X)	30
3.3 Metode Pengumpulan Data	32
3.4 Metode Analisis Data.....	33
3.4.1 Estimasi Regresi Data Panel.....	35
3.4.2 Uji Kesesuaian Model	36
3.4.3 Uji Statistik	39
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	40
4.1 Deskripsi Data Penelitian	40
4.2 Hasil Dan Analisis Data	49
4.2.1 Likelihood Ratio Test (Chow Test).....	49
4.2.2 Uji Hausman Test.....	50
4.2.3 Estimasi Fixed Effect Model.....	51
4.3 Hasil Uji Statistik.....	52

4.3.1 Koefisien Determinasi (R-square)	52
4.3.2 Uji F.....	53
4.3.3 Uji T	53
4.4 Interpretasi Hasil.....	57
4.4.1 Pengaruh PDRB Terhadap IPM	57
4.4.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap IPM.....	57
4.4.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan Terhadap IPM	58
4.4.4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan Terhadap IPM.....	58
4.4.5 Pengaruh Belanja Modal Terhadap IPM.....	58
4.5 Analisis Ekonomi.....	59
4.5.1 Analisis Intersept.....	59
4.6 Pembahasan	60
4.6.1 Pengaruh PDRB Dengan IPM Di Kabupaten/Kota Jambi	60
4.6.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Dengan IPM Di Kabupaten/Kota Jambi	61
4.6.3Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan Dengan Kabupaten/Kota Jambi.....	62
4.6.4Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan Dengan IPM Di Kabupaten/Kota Jambi.....	63
4.6.5 Pengaruh Belanja Modal Dengan IPM Di Kabupaten/Kota Jambi.....	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 Simpulan.....	65
5.2 Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Rata-rata IPM Kabupaten/Kota Jambi tahun 2010-2017.....	41
Gambar 4.2 Rat-rata PDRB Kabupaten/Kota Jambi Tahun 2010-2017	41
Gambar 4.3 Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Jambi Tahun 2010-2017.....	42
Gambar 4.4 Rata-rata Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan Kabupaten/Kota Jambi tahun 2010-2017.....	42
Gambar 4.5 Rata-rata Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan Kabupaten/Kota Jambi tahun 2010-2017.....	43
Gambar 4.6 Rata-rata Belanja Modal Kabupaten/Kota Jambi Tahun 2010-2017.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Data IPM Kabupaten/Kota Jambi Tahun 2010-2017.....	72
Lampiran II	Data PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten/Kota Jambi Tahun 2010-2017 (juta rupiah).....	73
Lampiran III	Data Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Jambi Tahun 2010-2017 (ribu jiwa)	74
Lampiran IV	Data Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan Kabupaten/Kota Jambi Tahun 2010-2017 (juta rupiah).....	75
Lampiran V	Data Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan Kabupaten/Kota Jambi Tahun 2010-2017 (juta rupiah).....	76
Lampiran VI	Data Belanja Modal Kabupaten/Kota Jambi Tahun 2010-2017 (juta rupiah)	77
Lampiran VII	Hasil Pengujian Likelihood Ratio Test.....	78
Lampiran VIII	Hasil Pengujian Hausman Test	79
Lampiran IX	Hasil Common Effect.....	80
Lampiran X	Hasil Fixed Effect	81
Lampiran XI	Hasil Random Effect	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera (%).....	2
Tabel 1.2	Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia (%).....	4
Tabel 1.3	Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jambi (%).....	6
Tabel 1.4	Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2017.....	7
Tabel 1.5	Rata-Rata Angka Harapan Hidup Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2010.....	9
Tabel 2.1	Kajian Pustaka.....	14
Tabel 4.1	Diskripsi Data IPM, PDRB, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan, Belanja Modal Di Provinsi Jambi Tahun 2010-2017.....	40
Tabel 4.2	Hasil Pengujian Likelihood Ratio Test.....	49
Tabel 4.3	Hasil Pengujian Hausman Test.....	50
Tabel 4.4	Estimasi Output Hasil Reg res Fixed Effect Model.....	51

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2017

Ainun Mardiyah

Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

ainunmardiyahhh13@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk Miskin, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, Belanja Modal, terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Jambi pada tahun 2010 sampai 2017. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pusat Statistik Jambi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model regresi data panel, analisis data dengan metode *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, PDRB, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, Belanja Modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Jumlah Penduduk Miskin tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan sedangkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk Miskin, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, Belanja Modal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan- kegiatan yang dapat dilaksanakan di negara/wilayah yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya. Pembangunan dilakukan sebagai proses di mana saling keterkaitan dan saling memiliki pengaruh antar faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya perkembangan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama sehingga akan diketahui runtutan peristiwa yang muncul akan mewujudkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya. (Mirza: 2012)

Pada dasarnya, pembangunan harus menggambarkan perubahan total dari suatu masyarakat tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya. Pembangunan bertujuan untuk membawa perubahan secara terus-menerus yang akan memiliki tujuan akhir yaitu bergerak lebih maju menjadi kehidupan yang lebih baik.

Paradigma yang berkembang saat ini adalah pembangunan ekonomi yang diukur dengan kualitas manusianya (*human development*). Pada dasarnya perubahan paradigma pembangunan menjadikan tujuan akhir pembangunan, bukan sebagai alat pembangunan. Pembangunan manusia mementingkan pada

kesejahteraan, mendapatkan kehidupan yang layak baik secara materi maupun non materi. (Bhakti: 2012)

Salah satu untuk melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* yang diukur melalui tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas hidup manusia (manusia/kependudukan), juga dapat menentukan level suatu wilayah. IPM berkisaran antara 0 sampai 100 dengan rincian IPM yang kecil dari 50 termasuk kategori rendah, IPM dari 50 sampai 80 termasuk kategori sedang/menengah dan IPM besar dari 80 termasuk kategori tinggi (Mirza, 2012). Dibawah ini merupakan tabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera.

Tabel 1.1

Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera (%)

Provinsi	2017
Aceh	70.60
Sumatera Utara	70.57
Sumatera Barat	71.24
Riau	71.79
Jambi	69.99
Sumatera Selatan	68.86
Bengkulu	69.95
Lampung	68.25
Kep.Bangka Belitung	69.99
Kep. Riau	74.45

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Dari tabel diatas dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Tahun 2017 yang tertinggi yaitu di Kep.Riau sebesar 74.45% dan terendah ada di Provinsi Lampung yaitu sebesar 68.25%.Jika dilihat dari peringkat masing-masing IPM antar Provinsi di Sumatera, Jambi menempati urutan ke-6 dari 10 Provinsi yang ada di Sumatera.IPM Provinsi Jambi yaitu 69.99%, termasuk dalam kategori sedang.

Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan, banyaknya negara maju yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti penyalahgunaan obat terlarang, alkohol, AIDS, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki secara bijaksana untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia (UNDP, 1990).

Hal tersebut menjadi dasar pentingnya pembangunan manusia, dimana dalam pembangunan manusia tidak hanya meliputi dimensi kesejahteraan saja melainkan terkait juga dengan peningkatan kapasitas dasar manusia melalui akses terhadap pendidikan dan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang publik (UNDP, 1990).Di bawah ini merupakan tabel Index Pembangunan Manusia di Indonesia.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia (%)

Tahun	IPM
2010	66.53
2011	67.09
2012	67.7
2013	68.31
2014	68.9
2015	69.55
2016	70.18
2017	70.81

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya belum memuaskan. Pada tahun 2010 tingkat IPM Indonesia berada pada angka 66,53, kemudian naik 0,56 menjadi 67,09. Pada tahun 2015 IPM Indonesia berada pada angka 69,55, kemudian naik 0,63 menjadi 70,18 dan pada tahun 2017 naik sebesar 0,63 menjadi 70,81. Ini artinya IPM di Indonesia mengalami peningkatan sejak 2015 sampai dengan 2017. Namun walaupun peningkatan IPM di Indonesia tidak diikuti dengan pemerataan IPM di masing-masing provinsi. Ipm di 38 provinsi sangat berbeda-beda khususnya kabupaten/kota di Provinsi Jambi di Tahun 2017 sebesar 69.99%. Jika dibandingkan IPM Provinsi Jambi dengan IPM Nasional di tahun 2017 sebesar

70.81% maka, IPM Provinsi Jambi di bawah nasional. Tinggi rendahnya tingkat IPM sangat berkaitan dengan peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam suatu pembangunan dengan melalui kebijakan fiskal. Dalam mewujudkannya melalui instrumen-instrumen kebijakan fiskal diantara instrumen tersebut yaitu pengalokasian dana atau anggaran melalui APBD yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan belanja modal.

Pembangunan di Indonesia khususnya pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih tergantung pada transfer dana dari pemerintahan pusat. Menurut Riva (2011) walaupun otonomi sudah berjalan di setiap daerah namun pemerintah daerah belum sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat salah satunya dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Provinsi Jambi adalah Provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah provinsi yang terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota yang memiliki nilai IPM tidak jauh berbeda dengan nilai IPM nasional bahkan nilainya dibawah dari nilai IPM nasional. Melihat rendahnya nilai IPM dibanding dengan nilai IPM nasional perlu mendapatkan perhatian. (BPS).

Di bawah ini merupakan rata-rata Indeks Pertumbuhan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2017:

Tabel 1.3

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi (%)

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Batanghari	65.67	66.32	66.97	67.24	67.68	68.05	68.7	68.92
Bungo	66.28	66.7	67.2	67.54	67.93	68.34	68.77	69.04
Merangin	63.85	64.4	65.31	65.82	66.21	67.15	67.86	68.3
Kerinci	65.16	65.85	66.71	67.49	67.96	68.89	69.68	70.03
Muaro Jambi	62.84	63.39	64.17	65.14	65.71	66.66	67.55	67.86
Soralangun	64.64	65.2	66.16	67.13	67.67	68.1	68.73	69.03
Tj.Jabung Barat	61.49	61.98	62.86	63.54	64.04	65.03	65.91	66.15
Tj.Jabung Timur	57.21	57.77	58.63	59.41	59.88	61.12	61.88	62.61
Tebo	63.62	64.45	65.23	65.91	66.63	67.29	68.05	68.16
Jambi	72.23	72.96	73.78	74.21	74.86	75.58	76.14	76.74
Sungai Penuh	69.91	70.55	71.23	72.09	72.48	73.03	73.35	73.75

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2017

Tabel 1.2 menunjukkan IPM per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode tahun 2010-2017 yang setiap tahunnya mengalami perubahan. IPM per Kabupaten/Kota di Jambi yang tertinggi diraih oleh Kota Jambi dengan IPM sebesar 76,74%. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan perolehan IPM terendah di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 57,21%. IPM setiap Kabupaten/Kota termasuk dalam golongan IPM sedang (BPS, 2017).

Tingginya IPM dapat dipengaruhi oleh tingginya tingkat lama sekolah dalam hal tersebut masuk dalam kategori pendidikan. Pendidikan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap perkembangan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan sikap dan produktivitas sehingga pendidikan mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas.

Tabel 1.4

Rata-rata Tingkat Lama Sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2017

Kabupaten/Kota	Rata-Rata
Kabupaten Batanghari	7.45
Kabupaten Bungo	7.88
Kabupaten Merangin	7
Kabupaten Kerinci	7.6
Kabupaten Muaro Jambi	7.71
Kabupaten Sorolangun	7.07
Kabupaten Tj.Jabung Barat	7.16
Kabupaten Tj.Jabung Timur	5.79
Kabupaten Tebo	7.22
Kota Jambi	10.37
Kota Sungai Penuh	9.07

Sumber: BPS 2017

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan di provinsi Jambi tahun 2010-2017 selalu mengalami kenaikan. Rata-rata tingkat pendidikan tertinggi diperoleh Kota Jambi dengan perolehan rata-rata pendidikan sebesar 10.37 artinya rata-rata penduduk menempuh pendidikan selama 10.37 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA, sedangkan rata-rata tingkat pendidikan terendah

diperoleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan perolehan rata-rata tingkat pendidikan sebesar 5.79 artinya rata-rata penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempuh pendidikan selama 5.79 tahun atau setara dengan pendidikan SD kelas 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di kabupaten/kota di provinsi Jambi belum merata karena rata-rata tertinggi dan terendah terpaut cukup jauh.

Selain tingkat pendidikan, pengeluaran perkapita juga mempengaruhi tingginya IPM. Pengeluaran perkapita mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingginya pengeluaran perkapita maka daya beli masyarakat juga tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Komponen pembentuk IPM lainnya adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup ini merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah terkait pada tingkat kesehatan masyarakat (Feriyanto: 2014).

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Kabupaten/Kota di Jambi selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya selama periode tahun 2010-2017. Rata-rata angka harapan hidup tertinggi di peroleh oleh Kota Jambi dengan rata-rata angka harapan hidup sebesar 72.30 tahun, artinya rata-rata penduduk di Kota Jambi dapat bertahan hidup hingga usia 72.30 tahun. Sedangkan rata-rata angka harapan hidup terendah diperoleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan rata-rata angka harapan hidup sebesar 65.25 tahun, artinya rata-rata

penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat bertahan hidup hanya sampai usia 65.25 tahun.

Tabel 1.5
Rata-rata Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
Tahun 2010-2017

Kabupaten/Kota	Rata-Rata
Kabupaten Batanghari	69.75
Kabupaten Bungo	66.85
Kabupaten Merangin	70.91
Kabupaten Kerinci	69.17
Kabupaten Muaro Jambi	70.73
Kabupaten Sorolangun	68.70
Kabupaten Tj.Jabung Barat	67.54
Kabupaten Tj.Jabung Timur	65.25
Kabupaten Tebo	69.69
Kota Jambi	72.30
Kota Sungai Penuh	71.52

Sumber: BPS

Faktor yang diduga mempengaruhi IPM adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jumlah PDRB akan mengubah konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Daya beli masyarakat dalam membeli suatu barang berkaitan dengan IPM yaitu indikator pendapatan (Todaro: 2006). Faktor lain yang mempengaruhi IPM adalah jumlah penduduk miskin, dimana

kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Faktor lain yang mempengaruhi IPM adalah jumlah pelayanan kesehatan seperti pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dimana dengan banyaknya banyaknya anggaran untuk kesehatan maka kebutuhan kesehatan masyarakat akan lebih terpenuhi, dan faktor lain yang mempengaruhi IPM adalah belanja modal dimana anggaran untuk melengkapi kebutuhan dalam pembangunan agar mempermudah akses menuju satu tempat ke tempat yang lain, yang tidak lain bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

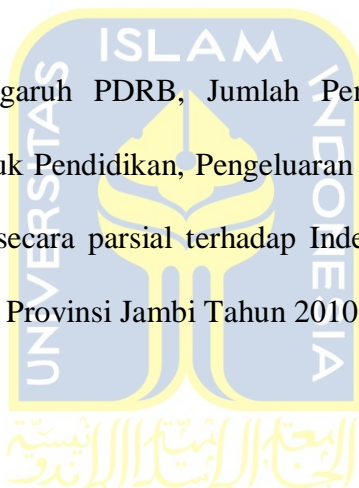
Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2010 sampai dengan 2017 Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dan penurunan.. Oleh karena itu akan menjadi perhatian penulis untuk meneliti sejauh mana PDRB, Jumlah Penduduk Miskin, pengeluaran pemerintah daerah untuk kesehatan, pengeluaran pemerintah daerah untuk pendidikan, dan belanja modal dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Dengan demikian, penelitian ini berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2010-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi:

1. Bagaimana pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan, Belanja Modal secara simultan atau secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2017?
2. Bagaimana pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan, Belanja Modal secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2017?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan, Belanja Modal secara simultan atau secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2017.

2. Menganalisis pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan, Belanja Modal secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam sebuah perencanaan dan pembangunan suatu daerah yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) khususnya di pulau Kalimantan.
2. Bagi penulis, untuk melatih kemampuan dalam menulis serta menerapkan ilmu yang didapatkan selama proses perkuliahan.
3. Bagi pengembang ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai suatu sumber referensi bagi penelitian-penelitian periode selanjutnya

1.5 Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Isi dari pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II kajian pustaka dan landasan teori

Kajian pustaka merupakan pengkajian dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan. Sedangkan, landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab metodologi penelitian akan menguraikan tentang jenis dan cara mengumpulkan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

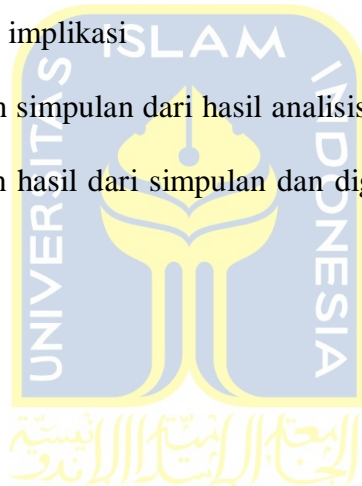
4. Bab IV Hasil dan Analisis

Dalam bab hasil dan analisis terdapat ini dua sub bab yaitu data penelitian yang berupa pemaparan data yang digunakan dalam penelitian dan hasil serta analisis yang merupakan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisisnya.

5. Bab V Simpulan dan implikasi

Simpulan merupakan simpulan dari hasil analisis yang digunakan sebelumnya.

Implikasi merupakan hasil dari simpulan dan digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dengan tujuan untuk memperkaya wawasan penelitian maka disajikan penelitian terdahulu sebagai pendukung dari penelitian ini. Penelitian yang terdahulu juga bisa dijadikan bahan pertimbangan kajian serta sebagai data pendukung penelitian. Sebagai pertimbangan dalam penentuan variabel dalam penelitian yang terkait dengan indeks pembangunan manusia, dengan menggunakan beberapa variabel untuk mengetahui seberapa pengaruhnya indeks pembangunan manusia. Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan pendukung penelitian seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Kajian Pustaka

No	Penelitian dan Judul	Metode dan Hasil Penelitian
1.	Rizki Nurfadhli(2017) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Pulau Sumatera Periode Tahun 2010-2015 Skripsi Published http://digilib.uin-suka.ac.id/24893/	Analisis ini menggunakan metode panel data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesehatan dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel pendidikan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM.
2.	Ayunanda Melliana, dkk(2013) Analisis Statistika Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Menggunakan Regresi Panel Jurnal Sains Dan Seni http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/4844	Analisis ini menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel rasio siswa terhadap guru, angka partisipasi SMP/MTs, jumlah sarana kesehatan, persentase rumah tangga dengan akses air bersih, kepadatan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan rasio guru-murid SMP/MTs tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM

Tabel 2.1 (Lanjutan)

3.	Deni Sulistio Mirza(2012) Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009 Jurnal EP Unnes http://eprints.ums.ac.id/47451/17/rela-naspub.i.pdf	Analisis ini menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
4.	Ahmad Rifa'i(2016) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta Skripsi Published https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/4045/04%20abstract.pdf?sequence=4&isAllowed=y	Hasil regresi menggunakan metode data panel Fixed effect model diketahui bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, variabel belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM pada kab/kota di Yogyakarta
5.	Muliza, dkk(2017) Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan PDRB Terhadap IPM Di Provinsi Aceh Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/download/6993/5733	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan estimasi parameter model menggunakan random effect (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, dan variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
6.	Agnesia Elsanti Putri(2018) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa tengah Skripsi Unpublished Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil dari regresi data panel menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model (REM). Hasil penelitian ini adalah bahwa kemiskinan dan UMK berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak signifikan terhadap IPM.

Tabel 2.1 (Lanjutan)

7.	Ratna Ayu Kusmaningrum (2016) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Skripsi Unpublished Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil dari regresi data panel menunjukkan bahwa model yang terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan PDRB tidak signifikan, sedangkan jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan signifikan terhadap IPM Provinsi Jawa Tengah.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang telah di paparkan diatas, maka penelitian ini yang akan dilakukan merujuk pada penggunaan variabel yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Pulau Sumatera (tahun 2010-2015)”. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut , variabel dependen yang digunakan yaitu indeks pembangunan manusia (IPM). Sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu PDRB, tingkat pengangguran terbuka (TPT), jumlah penduduk miskin, APBD pendidikan, dan APBD kesehatan.

Sedangkan pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan sama dengan variabel diatas yaitu indeks pembangunan manusia (IPM). Sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu PDRB, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, dan belanja modal. Terdapat perbedaan pada variabel independen yaitu menggunakan variabel belanja modal. Penelitian ini menggunakan alat analisis

yang sama dengan penelitian terdahulu yaitu dengan menggunakan metode regresi data panel.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori dibuat sebagai penghubung antara penelitian dengan teori-teori yang mendukung penelitian. Teori-teori yang digunakan untuk mendukung asumsi penelitian adalah sebagai berikut:

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM biasa digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup seseorang (Windhu, 2017).

Variabel Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru (BPS: 2018):

1.. Angka harapan hidup saat lahir – AHH

Angka harapan hidup saat lahir diartikan sebagai rata-rata banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH menggambarkan tingkat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung berdasarkan melalui sensus dan survei penduduk.

2. Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah diartikan sebagai jumlah tahun yang dipakai oleh penduduk dalam menjalankan proses pendidikan formal. Asumsinya bahwa dalam

kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Usia penduduk yang dihitung dalam mengumpulkan data rata-rata lama sekolah yaitu penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.

3. Angka harapan lama sekolah

Angka harapan lama sekolah diartikan sebagai lamanya bersekolah (dalam tahun) yang diharapkan mampu dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Asumsinya adalah peluang anak bersekolah akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya yang akan datang sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur pada saat ini.

Angka harapan lama sekolah juga dihitung untuk anak usia 7 tahun keatas. HLS juga dapat digunakan untuk menghitung seberapa kualitas sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya bersekolah (dalam tahunan) diharapkan mampu mencapai semua anak disuatu daerah.

4. Pengeluaran per kapita disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan dapat ditentukan melalui melihat pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dapat diperoleh melalui Susenas. Perhitungannya dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100. Cara perhitungan paritas daya beli pada metode baru ini menggunakan 96 komoditas diantaranya 66 komoditas diantaranya merupakan makanan dan sisanya

merupakan komoditas nonmakanan. Cara menghitung paritas daya beli yaitu dengan menggunakan metode ratio.

Pada paradigma baru, pembangunan difokuskan sebagai proses yang multidimensional dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Maka demikian indikator pembangunan yang harus digunakan tidak hanya indikator ekonomi, akan tetapi indikator sosial, seperti *Human Development Index (HDI)* / IPM dan *Physical Quality of Life Index (PQLI)* juga dapat mempengaruhi indikator pembangunan suatu negaraterhadap negara lain. Indikator ekonomi maupun sosial tidak dapat berdiri sendiri sebagai indikator pembangunan berarti tingkat kemiskinan tidak dapat hanya terukur menggunakan variabel pendapatan ataupun kepuasan saja. Untuk itu sen merumuskan indikator pembangunan dengan membandingkan HDI rank terhadap real GNP per kapita rank (Sen, 1999).

Paradigma pembangunan yaitu suatu proses yang menyeluruh mendekati seluruh aspek baik ekonomi, sosial, budaya, hukum, maupun yang lainnya. Pembangunan merupakan tolak ukur terhadap suatu persoalan pembangunan, dengan demikian pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat.

United Nation for Development Program (UNDP) yaitu mengembangkan suatu indeks atau sekarang lebih dikenal Indeks Pembangunan manusia (*Human Development Index = HDI*). Untuk mengukur besarnya indeks yaitu dengan

melihat besarnya antara 0 sampai dengan 1,0. Maka dengan semakin mendekati 1 berarti indeks pembangunan manusianya tinggi, jika kurang dari satu maka indeks pembangunan manusianya rendah. Dalam menyusun indeks pembangunan manusia maka indikator-indikator yang dipakai adalah:

1. Tingkat daya beli masyarakat
2. Tingkat harapan hidup
3. Tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli masing-masing di suatu negara. (Lincoln: 1999)

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis beberapa komponen dasar kualitas hidup manusia. IPM dihitung berdasarkan data keempat komponen yaitu angka harapan hidup seperti bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dalam pencapaian pembangunan, dan kemampuan masyarakat dalam membeli suatu kebutuhan dengan mengukur pengeluaran perkapita dalam pencapaian standar hidup yang layak (BPS, 2018).

2.1.2 Pengaruh PDRB Terhadap IPM

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator yang sangat penting untuk mengetahui kondisi perekonomian disuatu daerah dalam satu periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu, ataupun jumlah

nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada seluruh daerah (BI, 2018).

Untuk melihat seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah yaitu dengan melihat angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Biasanya PDRB per kapita itu digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan, semakin tinggi PDRB per kapita disuatu wilayah maka akan menghasilkan lebih besar tingkat potensi sumber penerimaan daerah tersebut, karena pendapatan daerahnya yang semakin besar. Maka semakin tinggi PDRB per kapita maka penduduk disuatu daerah sudah mengalami kesejahteraan dan sudah menunjukkan tingkat pertumbuhan di daerah tersebut sudah tergolong tinggi. (Nita: 2017).

Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi dengan melalui kapabilitas penduduk yang konsekuensinya meningkatnya produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan adanya peningkatan produktivitas dan kreativitas tersebut, masyarakat mampu mengoptimalkan dan mengolah sumber daya yang ada untuk menunjang pertumbuhan perekonomian (Brata, 2004).

Serata turunan produk domestik regional bruto (PDRB):

1. PDRB atas harga pasar

Produk domestik regional bruto atas harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari semua sektor perekonomian wilayah.

2. Produk Domestik Regional Neto (PDRN)

PDRN adalah PDRB atas harga pasar dikurangi dengan penyusutan, penyusutannya adalah nilai susutnya barang-barang modal tetap yang digunakan dalam periode tertentu.

3. PDRB perkapita

Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, terdapat dua ukuran PDRB per kapita, PDRB per kapita atas harga berlaku (nominal) dan PDRB atas harga konstan (riil).

2.1.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap IPM

Kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya dikarenakan kebutuhan manusia sangat beragam maka kemiskinan memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, kemiskinan meliputi aspek primer yaitu miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan, serta aspek sekunder yaitu miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut digolongkan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Lincoln, 2010).

Jika dilihat dari sasaran yang dicapai oleh sebuah kelompok, terdapat beberapa tipe penggolongan kemiskinan. Tujuan dari penggolongan ini yaitu agar terwujudnya suatu sasaran suatu program agar mendapatkan hasil yang jelas. Kemiskinan dibagi dalam tiga kategori, yaitu (Sumodiningrat, 2009):

1. Kemiskinan absolut adalah ketika pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya .
2. Kemiskinan relatif adalah situasi dimana ada sekelompok komunitas yang berada diposisi kemiskinan diatas garis kemiskinan berdasarkan antara jarak miskin dan nonmiskin.
3. Kemiskinan struktural adalah keadaan sekelompok orang atau individu yang berada di garis kemiskinan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi tidak mau berusaha untuk keluar dari kemiskinan dan berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Sekelompok orang atau individu tersebut lebih memilih bantuan yang datang untuk memenuhi kebutuhannya dan mendorong untuk keluar dari kemiskinan.

Kebijakan dalam mengurangi kemiskinan menurut (Lincoln: 1999) sebagai berikut:

1. Pembangunan pertanian

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada 3 aspek dalam pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi cukup besar bagi pengurangan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Kontribusi terbesar bagi peningkatan pendapatan pedesaan dan pengurangan kemiskinan pedesaan dihasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk dalam pembangunan irigasi.

2. Pembangunan Sumberdaya Manusia

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan social (pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk. Pelayanan-pelayanan pokok seperti air bersih, tempat pembuangan sampah, perumahan dan lain-lainnya juga penting bagi golongan miskin.

3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM bisa memainkan peran yang lebih besar di dalam perencanaan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas yang mereka bina, keterlibatan LSM –LSM ini di dalam program-program pemerintah cenderung untuk meningkatkan penerimaan masyarakat pedesaan terhadap program-program pemerintah dan oleh karena itu pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan LSM-LSM juga dapat meringankan biaya finansial dan staf dalam pengimplementasia program padat karya untuk mengurangi kemiskinan. Bentuk dan macam organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti berikut:

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- b. Lembaga Pembinaan Swadaya Masyarakat (LPSM)
- c. Organisasi-Organisasi Sosial Lainnya
- d. Organisasi-Organisasi Semi-Pemerintah

2.1.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan Terhadap IPM

Belanja pendidikan adalah suatu tugas atau kewenang belanja daerah untuk mendanai kebutuhan di bidang pendidikan, untuk melaksanakan tugas dari pemerintah untuk memfasilitasi suatu provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengalokasian dana pendidikan diatur bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Muliza, dkk, 2017).

Biaya-biaya pendidikan digolongkan dalam dua jenis yaitu, biaya-biaya pendidikan individual dan biaya-biaya pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan langsung individual ini berkenaan langsung pada pendapatan per kapita masyarakat. Sedangkan biaya pendidikan tidak langsung individual adalah segenap biaya moneter atau uang yang harus ditanggung oleh siswa dan keluarganya untuk membiayai pendidikan (Todaro, 2000).

Investasi dalam bidang pendidikan sangat dibutuhkan maka demikian pemerintah harus dapat membangun sarana dan prasarana pendidikan yang sangat baik. Pengeluaran pemerintah dalam sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk membangun dan menyediakan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia mulai dari sabang sampai marauke secara merata dan adil (Wahid, 2012).

2.1.5 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan Terhadap IPM

Undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang anggaran kesehatan adalah UU No. 36 tahun 2009 yaitu bahwa anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji , sementara besar anggaran pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji (Alison, dkk, 2017).

Pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan rakyat dan suatu kebutuhan mendasar serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan suatu tujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan yang layak bagi penduduk. Mendapatkan kualitas hidup yang layak akan menjadikan rakyatnya yang memiliki kesehatan yang baik dan akan mempengaruhi suatu kinerja pemerintah dalam pembangunan manusia (Todaro, 2003).

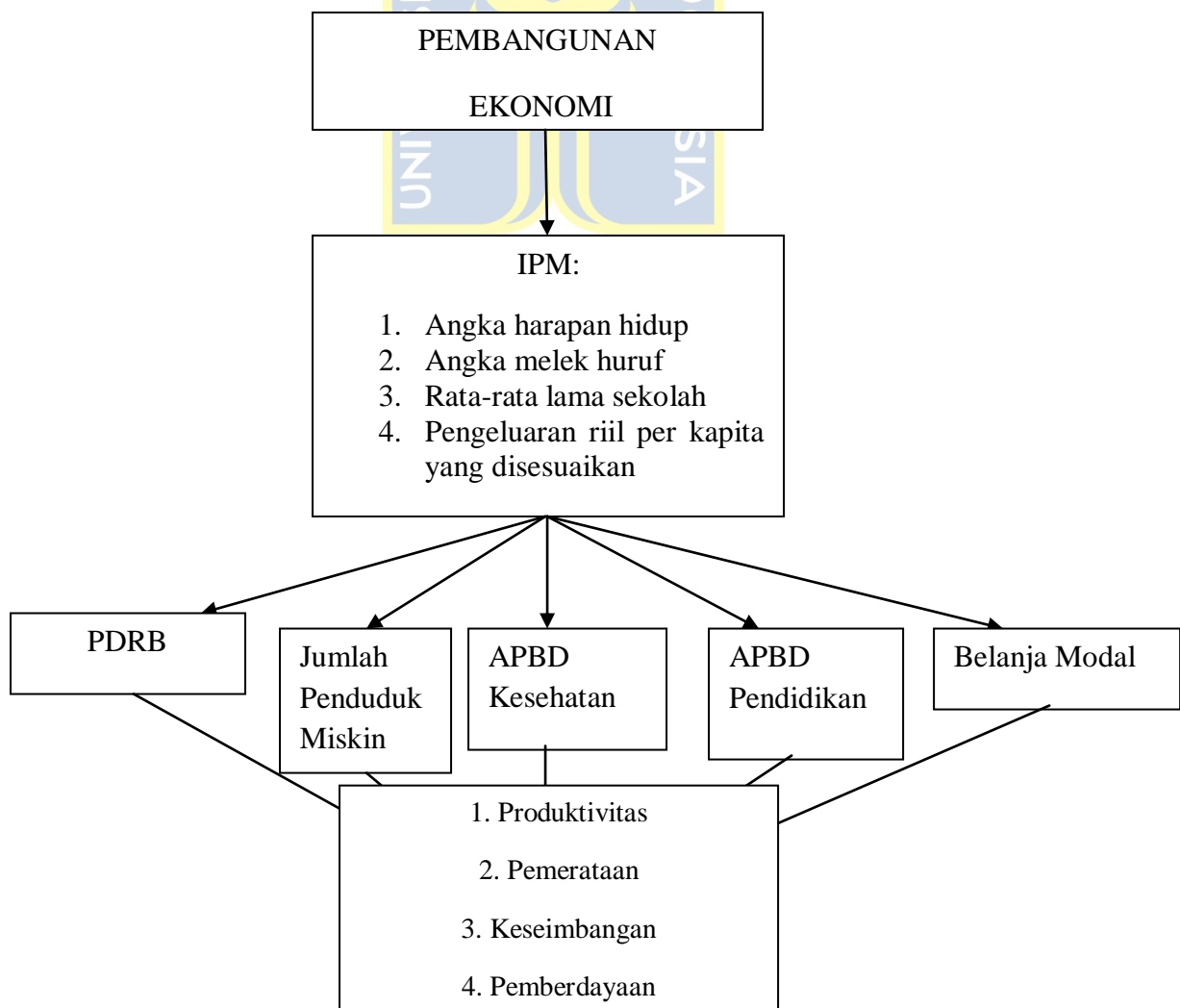
2.1.6 Pengaruh Belanja Modal Terhadap IPM

Belanja modal adalah salah satu belanja yang dilakukan pemerintah untuk menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2006). Pemerintah daerah melakukan alokasi dana dalam bentuk belanja modal (APBD) yang memiliki tujuan untuk meningkat investasi modal aset tetap yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta lainnya. Jika tingkat investasi semakin tinggi maka

diharapkan mampu meningkatkan layanan publik yang lebih berkualitas. Alokasi belanja modal pada dasarnya untuk kebutuhan daerah akan sarana prasarana, untuk kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Peningkatan fasilitas layanan publik akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat karena alokasi belanja untuk sarana pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan juga bertambah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) dipengaruhi oleh:



Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, maka perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia yaitu: PDRB, jumlah penduduk miskin, APBD pendidikan, APBD kesehatan, dan belanja modal. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia, maka dapat membantu pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jambi dalam menentukan kebijakan yang dapat bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas masyarakatnya dalam pembangunan manusia.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu dugaan sementara dari suatu persoalan yang perlu di uji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga PDRB, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan, Belanja Modal secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Diduga PDRB, Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan, Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Jumlah Penduduk Miskin secara simultan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pengumpulan data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Kalimantan. Adapun data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

1. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
2. PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
3. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
4. Pengeluaran pemerintah di Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
5. Pengeluaran pemerintah di Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
6. Belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data sekunder dalam bentuk deret waktu (*timeseries*) selama 8 tahun yaitu dari tahun 2010-2017, dan dalam bentuk *cross section* yaitu sebanyak 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Data ini diperoleh melalui Badan pusat Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik Jambi, dan Departemen Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk).

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Kalimantan. Menurut Badan Pusat Statistik (2007), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan: angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. Data IPM yang digunakan adalah data IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2017.

3.2.2 Variabel Independen (X)

Ada beberapa variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

1. PDRB (X_1)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah (produk) yang ditimbulkan dari berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan usaha pada suatu daerah harga konstan. Variabel ini memiliki satuan juta rupiah.

2. Jumlah Penduduk Miskin (X_2)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Sedangkan ukuran menurut *World Bank* merupakan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2017. Variabel ini memiliki satuan ribu jiwa.

3. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan (X_3)

Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran paa fungsi pendidikan yang buat melalui kementerian negara/lembaga, alokasinya melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah APBD di bidang pendidikan kabupaten/kota di Jambi tahun 2010-2017. Variabel ini memiliki satuan juta rupiah.

4. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan (X_4)

UU N0. 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 10 persen dari APBD di luar gaji. Sedangkan besar anggaran pemerintah sebanyak 5 persen dialokasikan dari APBN di luar gaji. Dalam penelitian ini data APBD di Bidang Kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2017. Variabel ini memiliki satuan juta rupiah.

5. Belanja Modal (X_5)

Belanja modal yaitu suatu langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai realisasi yang menghasilkan aktiva tetap. Belanja modal yang memiliki tujuan yaitu pemerintah untuk mendapatkan aset tetap bagi kabupaten/kota di Provinsi Jambi, seperti mendapatkan infrastruktur, bangunan-bangunan, peralatan, dan lainnya yang berbentuk aset. Dalam penelitian ini data belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2017. Variabel ini menggunakan satuan juta rupiah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian ini sepenuhnya melalui data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data-data dari literatur yang berkaitan baik berupa dokumen, maupun arsip. Kemudian data yang diperoleh disusun dan diolah sesuai berdasarkan kepentingan dan tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun

2010-2017 yang diperoleh dari Pelayanan Terpadu Badan Pusat Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik Jambi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) meliputi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), data PDRB, data jumlah penduduk miskin, data pengeluaran pemerintah di Bidang Pendidikan, data pengeluaran pemerintah di Bidang Kesehatan, dan Belanja Modal.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, yaitu data yang berbentuk bilangan. Analisis data yang dilakukan dengan menguji secara statistik terhadap variabel-variabel yang telah dikumpulkan dengan bantuan program Eviews 9. Analisis ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis dengan menggunakan alat analisis panel data sebagai alat pengolahan data. Data panel adalah data regresi gabungan dari time series dan cross section. Data time series adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti data harian, bulanan, kuartal atau tahunan. Sedangkan data cross section adalah data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa daerah, perusahaan atau perorangan (Widarjono: 2009). Dalam penelitian ini untuk mengetahui model yang tepat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen adalah sebagai berikut:

$$(IPM_{it}) = f \{PDRB_{it} + JPM_{it} + APBDpendi_{it} + APBDkes_{it} + BM_{it}\}$$

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = Ideks Pembangunan Manusia kabupaten/kota Provinsi Jambi periode 2010-2017 (Persen)

X1 = PDRB (Juta Rupiah)

X2 = Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)

X3 = APBD di Bidang Pendidikan (Juta Rupiah)

X4 = APBD di Bidang Kesehatan (Juta Rupiah)

X5 = Belanja Modal (Juta Rupiah)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefesien Regresi

i : Kabupaten/Kota

t : Waktu (tahun)

Selanjutnya analisis ini dilanjutkan dengan analisis regresi dengan data panel dapat dilakukan dengan tiga metode estimasi, yaitu estimasi Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Pemilihan metode disesuaikan dengan data yang tersedia dan reliabilitas antara variabel. Dengan pengujian sebagai berikut:

3.4.1 Estimasi Regresi Data Panel

1. Common Effect

Metode ini Model Regresi *Common Effect* yang memiliki tujuan yaitu merupakan teknik paling sederhana untuk menggunakan data panel, hanya dengan menggunakan penggabungan data cross section dengan time series tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu. (Widarjono,2013). Pada hasil regresi akan menunjukkan ketika terjadi kenaikan koefisien secara statistic uji t pada $\alpha = 1\%$ maka secara keseluruhan akan mempengaruhi uji F . Jika harga bahan pokok naik 1% maka nilai Y akan naik dan faktor lain diasumsikan tetap.

2. Fixed Effect

Dalam model ini mengasumsikan perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model Fixed Effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan intensif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Square Dummy Variable (LSDV). Hasil regresi metode fixed effect berhubungan terhadap variabel X_1 dan variabel X_2 bertanda positif sesuai hipotesis dan secara statistic signifikan melalui uji t pada $\alpha = 1\%$ semua variabel bertanda negative dan secara statistic juga signifikan. Signifikan terhadap variabel dummy menunjukkan bahwa intersep antara variabel X_1 ,

$X_2, X_3, X \dots$ dapat berbeda. Dengan demikian model fixed effect mampu menjelaskan adanya perbedaan perilaku diatas.

3. Random Effect

Model ini akan mengstimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random Effect perbedaan intersep di akomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan model Random Effect yakni menghilangkan heterokedasitas. Model ini juga disebut dengan Error Component (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS). Jika nilai koefisien untuk variabel $X_1 = 0,6084$ dan $X_2 = 0,3419$ secara statistik signifikan pada $\alpha=1\%$ artinya X_2 berpengaruh positif terhadap Y . Kalau nilai koefisien tersebut juga tidak jauh berbeda dengan metode Fixed Effect. Jika intersep (c) $-1,185$ merupakan nilai rata-rata dari komponen kesalahan random (random error component) dan nilai random effect menunjukkan besar perbedaan komponen kesalahan random coefficient terhadap nilai intersep semua coefficient rata-rata.

3.4.2 Uji Kesesuaian Model

Untuk memilih model yang tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu:

1. *Chow test* (Uji Chow)

Chow test menyebutkan sebagai pengujian F-statistik adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan Pooled Least Square atau Fixed

Effect. Sebagaimana yang diketahui bahwa terkadang asumsi bahwa setiap unit cross section memiliki perilaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat dimungkinkan setiap unit cross section memiliki perilaku yang berbeda. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H₀ : Model Pooled Test Square

H₁ : Model Fixed Effect

Dasar penolakan terhadap hipotesa nol (H₀) adalah dengan menggunakan F-statistik seperti yang dirumuskan oleh Chow :

$$F = \frac{(RSS1 - RSS2)/m}{(RSS2)/(n - k)}$$

Dimana :

RSS1 = Residual Sum Square hasil pendugaan model Fixed effect

RSS2 = Residual Sum Square hasil pendugaan Pooled Least Square

n = jumlah data cross section

m = jumlah data time series

k = jumlah variabel penjelas

Statistik Chow mengikuti distribusi F-statistik dengan derajat bebas (m, n, k) jika nilai Chow statistik (F-stat) hasil pengujian lebih besar dari Ftabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa Nol sehingga model yang digunakan adalah model fixed effect, dan begitu juga sebaliknya.

2. Uji Hausman

Hausman Test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan dalam memilih apakah menggunakan model fixed effect atau model random effect. Seperti apakah yang diketahui bahwa penggunaan model fixed effect mengandung suatu unsure trade-off yaitu derajat bebas memasukkan variabel dummy. Namun, penggunaan metode random effect juga harus memperhatikan ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat.

Hausman Test dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Model Random Effect

H_1 : Model Fixed Effect

Sebagai dasar penolakan hipotesa nol maka digunakan Ststistik Hausman dan membandingkan dengan Chi-Square. Statistik uji hausman ini mengikuti distribusi statistic Chi-Square dengan degree of freedom sebanyak k adalah jumlah variabel independen. Jika menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model fixed Effect sedangkan sebaliknya bila kita gagal menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang bisa digunakan random effect, (Widarjono: 2013).

3.4.3 Uji statistik

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2), Uji Koefisien Regresi secara bersama-sama (Uji F), dan Uji koefisien Regresi Parsial (Uji t).

1. Uji parsial (uji t statistik)

Uji ini dilakukan untuk melihat besarnya masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen menggunakan t-test.

Kriteria pengambilan keputusan menurut (Ghozali : 2008) yaitu:

- a. Apabila nilai probabilitas t hitung $< 5\%$ dan t hitung $>$ tabel maka hipotesis H_a diterima (H_0 ditolak)
- b. Apabila nilai probabilitas t hitung $> 5\%$ dan t hitung $<$ tabel maka hipotesis H_0 diterima (H_a ditolak)

2. Pengujian secara simultan (uji F statistik)

Uji F statistik digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen (Ghozali, 2005). Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05, kriteria pengambilan keputusan menurut sebagai berikut:

- a. Apabila nilai $F > 4$ dengan tingkat kepercayaan 5% dan F hitung $>$ F tabel, maka H_a diterima (H_0 ditolak)
- b. Apabila nilai $F < 4$ dengan tingkat kepercayaan 5% dan F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima (ha ditolak).

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Diskripsi Data Penelitian

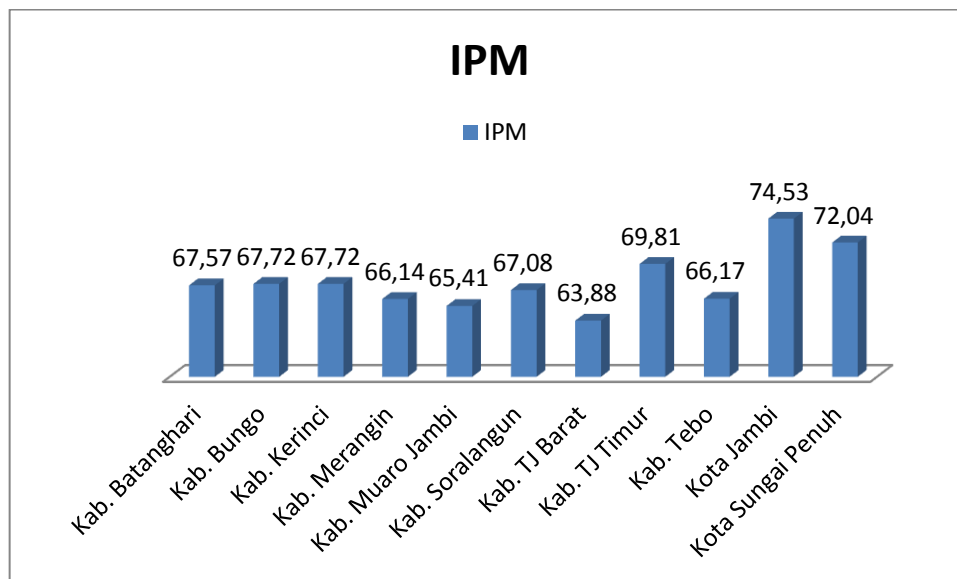
Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk meneliti variabel independen yang meliputi PDRB, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, dan belanja modal terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam kurun waktu 2010-2017. Tabel dibawah ini menjelaskan deskripsi data tersebut dan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Diskripsi Data IPM, PDRB, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan, Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2017

Variabel	Mean	Range	Nilai terbesar (Maximum)	Nilai terkecil (Minimum)
IPM	67,09	19,53	76,74	57,21
PDRB	6.655.440	26.812.077	27.361.787	549.710
Jumlah Penduduk Miskin	2.439	5.548	5.551	3
APBD Pendidikan	275.162	914.068	948.641	34.573
APBD Kesehatan	87.980	354.144	368.423	15.279
Belanja Modal	237.765	540.134	598.558	58.424

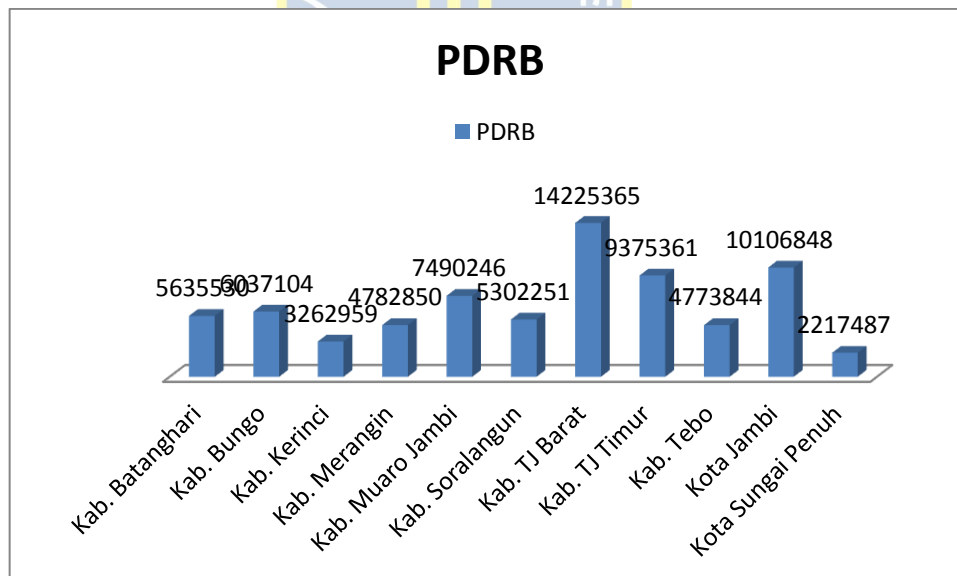
Sumber: Hasil data diolah menggunakan *eviews9*, 2018

Gambar 4.2 Rata-Rata IPM Kabupaten/Kota di Jambi Tahun 2010-2017



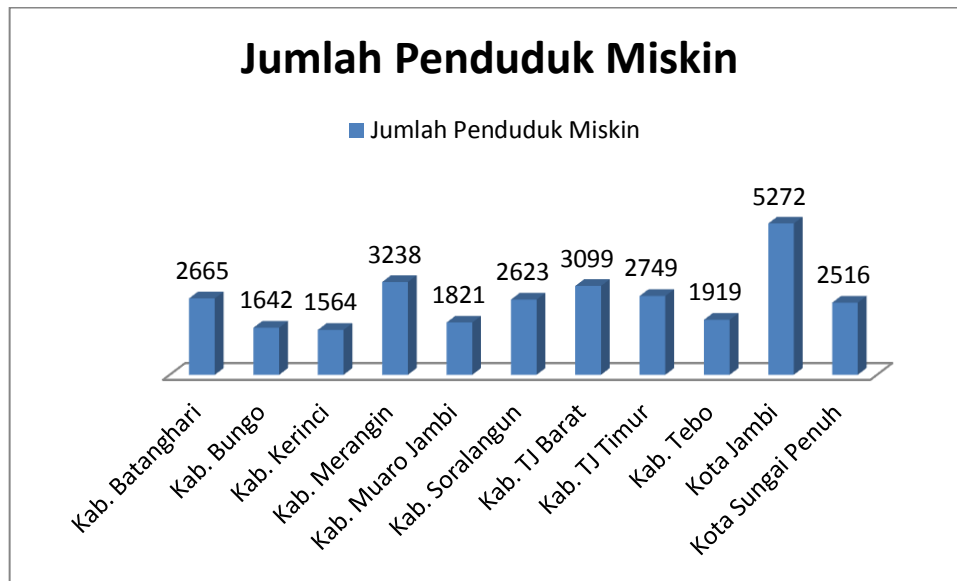
Sumber: Badan Pusat Statistik 2010-2017

Gambra 4.3 Rata-Rata PDRB Kabupaten/Kota di Jambi Tahun 2010-2017



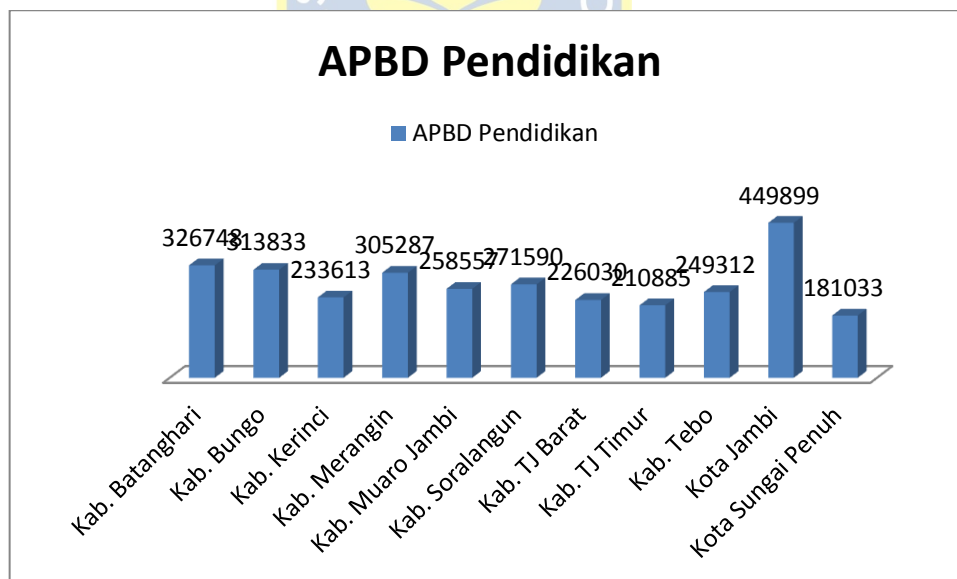
Sumber: Badan Pusat Statistik 2010-2017

Gambar 4.4 Rata-Rata Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jambi Tahun 2010-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik 2010-2017

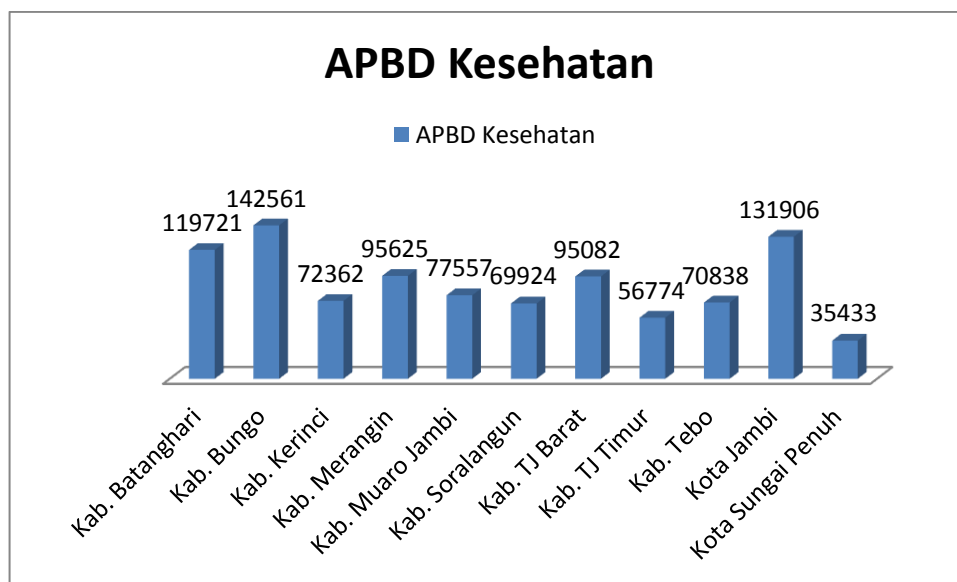
Gambar 4.5 Rata-Rata Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan Kabupaten/Kota di Jambi Tahun 2010-2017



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2010-2017

Gambar 4.6 Rata-Rata Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan Kabupaten/Kota di Jambi

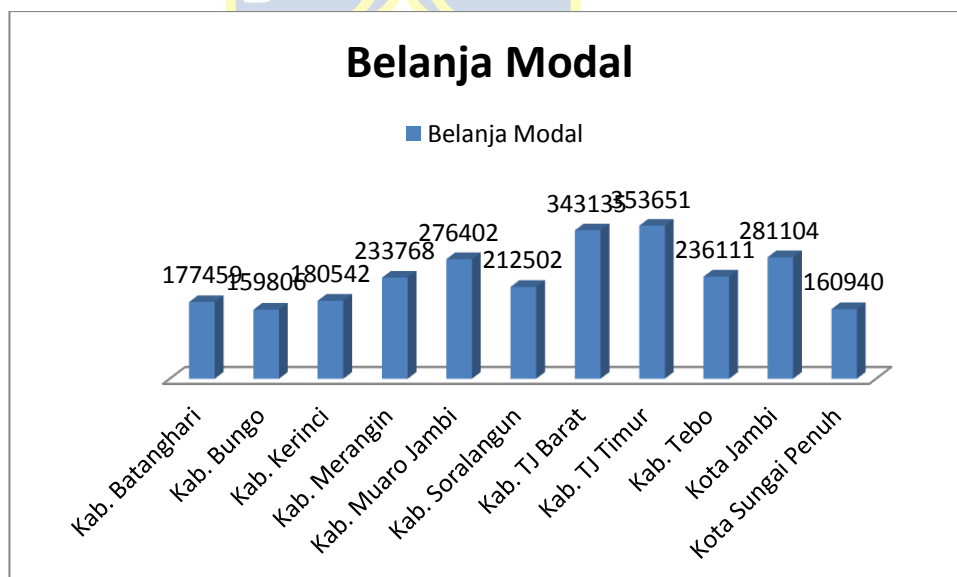
Tahun 2010-2017



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2010-2017

Gambar 4.7 Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jambi

Tahun 2010-2017



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2010-2017

Didapatkan nilai rata-rata IPM Provinsi Jambi tahun 2010-2017 selama delapan tahun yaitu 67.09%, dari data tersebut didapat rata-rata IPM tertinggi di atas IPM rata-rata kabupaten/kota Jambi meliputi Kabupaten Batanghari yaitu 67.57%, Kabupaten Bungo yaitu 67.72%, Kabupaten Kerinci yaitu 67.72%, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu 69.81, Kota Jambi 74.53%, dan Kota Sungai Penuh yaitu 72.04%. Namun, Kota Jambi memiliki rata-rata tertinggi di Kabupaten/Kota yaitu 74.53%, dikarenakan dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur perkotaan yang sangat mendukung bagi pembangunan manusia, serta kesadaran masyarakat yang sudah tinggi. Serta dilihat dari angka harapan hidup Kota Jambi pada tahun 2010-2017 selalu mengalami peningkatan pada tahun 2010 angka harapan hidup yaitu 72.25 artinya masyarakat Kota Jambi banyak memiliki usia sampai 72.25 tahun, sedangkan pada tahun 2017 angka harapan hidupnya naik menjadi 72.33 tahun. Sedangkan terdapat kabupaten yang memiliki rata-rata IPM terendah meliputi Kabupaten Merangin yaitu 66.14%, Kabupaten Muaro Jambi 65.41%, Kabupaten Sorolangun yaitu 67.08%, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu 63.88%, dan Kabupaten Tebo 66.17%.

Diketahui bahwa rata-rata PDRB harga konstandi Provinsi Jambi pada tahun 2010-2017 selama delapan tahun adalah Rp6.655.440.000.000. Dari data tersebut terdapat kabupaten/kota yang rata-rata PDRBnya di atas rata-rata, meliputi Kabupaten Muaro Jambi yaitu Rp 7.490.246.000.000, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Rp 14.225.365.000.000, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Rp 9.375.361.000.000. Kabupaten Tanjung Barat menjadi salah satu rata-rata PDRB paling tertinggi di atas rata-rata PDRB kabupaten/kota Jambi yaitu Rp

14.225.365.000.000.dilihat dari komponen pengeluaran yang besar yaitu ekspor pada tahun 2017 sebesar 72 persen dan konsumsi rumah tangga sebesar 44,1 persen. Dilihat dari struktur lapangan usahanya, masih didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan serta pertambangan dan penggalan. karena naiknya secara terus-menerus pada tahun 2010-2017. Namun, didapatkan kabupaten/kota Jambi yang memiliki rata-rata PDRB terendah meliputi, Kabupaten Batanghari yaitu Rp 5.635.533.000.000, Kabupaten Bungo yaitu Rp 6.337.104.000.000, Kabupaten Kerinci yaitu Rp 3.262.959, Kabupaten Merangin Rp 4.782.850.000.000, Kabupaten Soralangun Rp 5.302.251, Kabupaten Tebo yaitu 4.773.844, dan Kota Sungai Penuh yaitu Rp 2.217.487.

Didapatkan nilai rata-rata jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi pada tahun 2010-2017 atau selama 8 tahun yaitu 2.439.000 jiwa, dari data tersebut terdapat kabupaten/kota yang memiliki rata-rata jumlah penduduk miskin tertinggi diatas rata-rata Provinsi meliputi, Kabupaten Batanghari yaitu 2.655.00 jiwa, Kabupaten Merangin yaitu 3.283.000 jiwa, Kabupaten Soralangun yaitu 3.623.000 jiwa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu 3.099.000, Kabupaten Tanjung Timur yaitu 2.749.000 jiwa, Kota Jambi 5.272.000, dan Kota Sungai Penuh yaitu 2.516.000 jiwa. Kota Jambi mmiliki rata-rata penduduk miskin tertinggi di kabupaten/kota jambi yaitu 5.272.000 jiwa. Dikarenakan jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten. Peran komoditi makanan menjadi penyebab garis kemiskinan dibandingkan peran komoditi bukan makanan, seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabe merah, gula pasir, dan mie instan. Sedangkan

komoditi bukan makanan yaitu biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, pakaian. Namun, terdapat Kabupaten yang memiliki rata-rata penduduk miskin terendah diantaranya Kabupaten Bungo yaitu 1.642.000 jiwa, Kabupaten Kerinci 1.564.000 jiwa, Kabupaten Muaro Jambi 1.821.000 jiwa, dan Kabupaten Tebo yaitu 1.919.000 jiwa

Didapatkan nilai rata-rata pengeluaran pemerintah untuk pendidikan Provinsi Jambi tahun 2010-2017 atau selama delapan tahun yaitu Rp 275.162.000.000, terdapat kabupaten yang memiliki rata-rata pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tertinggi meliputi, Kabupaten Batanghari yaitu Rp 326.748.000.000, Kabupaten Bungo yaitu Rp 313.833.000.000, Kabupaten Merangin yaitu Rp 305.287.000.000, Kota Jambi yaitu Rp 449.899.000.000. Kota Jambi memiliki rata-rata pengeluaran pemerintah untuk pendidikan paling tertinggi yaitu Rp 449.899.000.000, dengan besarnya anggaran tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan dikota Jambi serta untuk membuat ruang kelas baru (RKB), dan untuk sarana dan prasarana. Terdapat sekolah yang belum permanen dikota Jambi sebanyak 23 sekolah dari 27 sekolah. Besarnya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di Kota Jambi juga salah satunya karena adanya penyelenggaraan Ujian Nasional berbasis computer atau UNBK, secara keseluruhan dana yang besar untuk menunjang program tersebut. Selain itu anggaran digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru, sehingga para siswa mampu bersaing dengan kota-kota lain. Namun, terdapat Kabupaten/Kota yang memilikirata-rata pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terendah meliputi, Kabupaten Kerinci yaitu Rp 233.613.000.000, Kabupaten Muaro Jambi yaitu Rp

258.557.000.000, Kabupaten Sorolangun yaitu Rp 271.590, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Rp 226.030.000.000, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Rp 210.885.000.000, Kabupaten Tebo yaitu Rp 249.312.000.000, dan Kota Sungai Penuh yaitu Rp 181.033.000.000

Didapatkan nilai rata-rata pengeluaran pemerintah untuk kesehatan kabupaten/kota Jambi pada tahun 2010-2017 atau selama delapan tahun yaitu Rp 87.980.000.000 rupiah, terdapat kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata pengeluaran pemerintah untuk kesehatan tertinggi diatas rata-rata pengeluaran pemerintah untuk kesehatan kabupaten/kota Jambi meliputi, Kabupaten Batanghari yaitu Rp 119.721.000.000, Kabupaten Bungo yaitu Rp 142.561.000.000, Kabupaten Merangin yaitu Rp 95.625.000.000, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Rp 95.082.000.000, dan Kota Jambi yaitu Rp 131.906.000.000. Kabupaten Bungo memiliki rata-rata pengeluaran pemerintah untuk kesehatan tertinggi yaitu Rp 142.561.000.000. Besarnya anggaran ini digunakan untuk pelayanan kesehatan gratis, di Kabupaten Bungo pada tahun 2014 secara nasional ditingkatkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Di tahun 2011-2012 dilakukan pengembangan ruang instalasi gawat darurat RSUD H.Hanafie, dan tahun 2012 dilakukan pembangunan 6 gedung poskesdes. Pembangunan tersebut bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, sebelumnya sebanyak 15 kasus kematian di tahun 2004 dan menurun menjadi 3 kasus kematian pada tahun 2012. Setelah ada perobatan gratis warga menjadi rutin memeriksakan kesehatannya. Namun, terdapat Kabupaten/Kota Jambi yang

memiliki rata-rata pengeluaran pemerintah untuk kesehatan terendah meliputi, Kabupaten Kerinci yaitu Rp 72.362.000.000, Kabupaten Muaro Jambi yaitu Rp 77.557.000.000, Kabupaten Sorolangun yaitu Rp 69.942.000.000, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Rp 56.774.000.000, Kabupaten Tebo yaitu Rp 70.838.000.000, dan Kota Sungai Penuh yaitu Rp 35.433.000.000.

Didapatkan nilai rata-rata belanja modal kabupaten/kota Jambi tahun 2020-2017 atau selama delapan tahun yaitu Rp 237.765.000.000 rupiah. Terdapat kabupaten/kota Jambi yang memiliki rata-rata belanja modal tertinggi diatas rata-rata kabupaten/kota Jambi meliputi, Kabupaten Muaro Jambi yaitu Rp 276.402.000.000, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Rp 343.135.000.000, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Rp 353.651.000.000, dan Kota Jambi yaitu Rp 281.104.000.000. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki rata-rata belanja modal tertinggi yaitu Rp 353.651.000.000, besarnya belanja modal pada Kabupaten tanjung Jabung Timur dikarenakan Kabupaten ini masih tahap pembangunan kondisinya masih tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten yang ada di Jambi. Untuk mendukung pembangunan ekonominya dibutuhkan dana yang besar untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan. Namun, terdapat kabupaten/kota Jambi yang memilikirata-rata belanja modal terendah meliputi, Kabupaten Batanghari yaitu Rp 177.459.000.000, Kabupaten Bungo yaitu Rp 159.808.000.000, Kabupaten Kerinci yaitu Rp 180.542.000.000, Kabupaten Merangin yaitu Rp 233.768.000.000, Kabupaten Sorolangun yaitu Rp 212.502.0000, Kabupaten Tebo yaitu Rp 236.111.000, dan Kota Sungai Penuh yaitu Rp 160.940.000.000.

4.2 Hasil Dan Analisis Data

Data yang dianalisis merupakan data panel, maka harus menentukan metode pendekatan analisis data panel yang diuji yaitu pendekatan *common effect*, pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Melalui uji Chow untuk memilih antara pendekatan *common effect* atau pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan uji Hausman untuk memilih antara pendekatan efek tetap (*fixed effect*) atau pendekatan efek acak (*random effect*). Sehingga pendekatan yang paling tepat dalam penelitian ini adalah pendekatan efek tetap (*fixed effect*).

4.2.1 Likelihood Ratio Test (Chow Test)

Likelihood ratio test digunakan untuk memilih model yang lebih baik untuk digunakan adalah pendekatan *common effect* atau pendekatan efek tetap (*fixed effect*). Uji ini dilakukan dengan prosedur uji F-statistik dengan hipotesis:

H_0 : *Common Effect Model* lebih baik daripada *Fixed Effect model*.

H_1 : *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Common Effect Model*.

Tabel 4.2

Hasil Uji Chow

Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	139.596039	(10,72)	0.0000
Cross-section Chi-square	265.316754	10	0.0000

Sumber: Hasil data diolah menggunakan Eviews 09, 2018.

Berdasarkan dari hasil pengujian di atas diperoleh angka probabilitas Cross-section F yaitu sebesar 0,0000 maka dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai p-value lebih kecil dari α (0,05), kemudian dapat disimpulkan dari hasil uji *Chow* adalah menolak H_0 , sehingga model *Fixed Effect Model* lebih baik untuk digunakan. Selanjutnya akan di uji melalui uji Hausman.

4.2.2 Uji Hausman Test

Hausman test digunakan untuk melihat pendekatan terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan hipotesis:

H_0 : *Random Effect Model* lebih baik daripada *Fixed Effect Model* .

H_1 : *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Random Effect Model*.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	39.108277	5	0.0000

Sumber: Hasil data diolah menggunakan Eviews 09, 2018.

H_0 : *Random Effect* probabilitas kurang dari 5% dan H_1 : *Fixed effect* probabilitas lebih besar dari 5%. Maka, hasil regresi diatas menunjukkan probabilitas F statistiknya yaitu sebesar 0,0000 atau kurang dari 5%, maka model yang lebih baik digunakan menurut pengujian ini adalah *Fixed Effect*

Model. Sehingga model dengan jenis pendekatan *fixed* layak digunakan sebagai pengujian model berikut:

4.2.3 Estimasi Fixed Effect Model

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berkaitan antar waktu dan individu. Maka diperoleh hasil seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Estimasi Output Hasil Reg res *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Sample: 2010 2017
Periods included: 8
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 88

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.08998	0.490042	130.7847	0.0000
PDRB	1.48E-07	2.05E-08	7.247531	0.0000
PEND_MISKIN	0.000199	0.000196	1.013089	0.3144
APBD_PENDI	-1.29E-06	1.55E-06	-0.836729	0.4055
APBD_KES	8.64E-06	3.94E-06	2.193925	0.0315
BELAN_MODAL	4.73E-06	1.33E-06	3.556900	0.0007

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.963401	Mean dependent var	67.09080
Adjusted R-squared	0.955776	S.D. dependent var	3.995608
S.E. of regression	0.840254	Akaike info criterion	2.652741
Sum squared resid	50.83394	Schwarz criterion	3.103166
Log likelihood	-100.7206	Hannan-Quinn criter.	2.834206
F-statistic	126.3512	Durbin-Watson stat	1.116232
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil data diolah menggunakan Eviews 09, 2018.

Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model* dapat dituliskan dengan model regresi dan persamaannya sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \epsilon_{it}$$

$$Y = 64.08998 + 1.48E-07 + 0.000199 - 1.29E-06 + 8.64E-06 + 4.73E-06$$

Dimana Y = Indeks Pembangunan Manusia (persen), X1 = PDRB (juta rupiah), X2 = Jumlah Penduduk Miskin (ribu rupiah), X3 = Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan (juta rupiah), X4 = Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan (juta rupiah), X5 = Belanja Modal (juta rupiah).

4.3 Hasil Uji Statistik

Berdasarkan hasil analisis dalam pemilihan model yang telah dilakukan dengan menggunakan Uji *Chow* dan Uji *Hausman* maka *Fixed effect Model* hasil yang terbaik untuk mengestimasi.

4.3.1 Koefisien Determinasi (R-square)

Dalam pengujian ini bertujuan untuk mengukur baiknya model regresi cocok dengan datanya atau pengukuran presentase total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi. Semakin angkanya mendekati 1 artinya semakin baik garis regresinya.

Nilai koefisien determinasi (R-square) pada *Fixed Effect Model* adalah sebesar 0,963401 yang artinya PDRB, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jambi mampu menjelaskan Indeks

Pembangunan Manusia sebesar 96,3401%, sedangkan sisanya 3,6599% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.3.2 Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel independen bersama-sama akan mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Hipotesis sebagai berikut:

H_0 : variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dengan signifikansi probabilitas F statistik lebih besar dari 5%.

H_1 : variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen dengan signifikansi probabilitas kurang dari 5%.

Nilai F-statistik pada model *Fixed Effect* yaitu diperoleh sebesar 126,3512 dengan probabilitas F-statistiknya sebesar 0,000000 >5% atau kurang dari (5%), maka H_0 ditolak artinya PDRB, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dan belanja modal dapat disimpulkan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM.

4.3.3 Uji t

Uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu untuk mengetahui variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil dari t hitung

dengan t tabel, namun dapat juga dilakukan dengan cara membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinan tertentu.

Apabila t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya secara signifikan variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Namun sebaliknya, apabila t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka artinya secara signifikan variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Hipotesis:

$H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak signifikan)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ (signifikan)

a. PDRB

berdasarkan hasil uji t tabel dua sisi dengan derajat kebebasan 82 dan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh hasil yaitu sebesar 1.989. Sedangkan nilai t hitung yaitu sebesar 7.247531.

Hasil dari regresi *Fixed Effect Model*, berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa t hitung $>$ t kritis. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan untuk nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan secara individu variabel PDRB di kabupaten/kota Provinsi Jambi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

b. Jumlah Penduduk Miskin

berdasarkan hasil uji t tabel dua sisi dengan derajat kebebasan 82 dan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh hasil yaitu sebesar 1.989. Sedangkan nilai t hitung yaitu sebesar 1.013089.

Hasil dari regresi *Fixed Effect Model*, berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa t hitung < t kritis. Sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sedangkan untuk nilai probabilitas sebesar $0.3144 > 0.05$, maka dapat disimpulkan secara individu variabel jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Jambi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

c. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan

berdasarkan hasil uji t tabel dua sisi dengan derajat kebebasan 82 dan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh hasil yaitu sebesar 1.989. Sedangkan nilai t hitung yaitu sebesar -0.836729.

Hasil dari regresi *Fixed Effect Model*, berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa t hitung < t kritis. Sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sedangkan untuk nilai probabilitas sebesar $0.4055 > 0.05$, maka dapat disimpulkan secara individu variabel pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di kabupaten/kota Provinsi Jambi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

d. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan

berdasarkan hasil uji t tabel dua sisi dengan derajat kebebasan 82 dan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh hasil yaitu sebesar 1.989. Sedangkan nilai t hitung yaitu sebesar 2.193925.

Hasil dari regresi *Fixed Effect Model*, berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa t hitung $>$ t kritis. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan untuk nilai probabilitas sebesar $0.0315 < 0.05$, maka dapat disimpulkan secara individu variabel pengeluaran pemerintah untuk kesehatan di kabupaten/kota Provinsi Jambi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

e. Belanja Modal

berdasarkan hasil uji t tabel dua sisi dengan derajat kebebasan 82 dan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh hasil yaitu sebesar 1.989. Sedangkan nilai t hitung yaitu sebesar 3.556900.

Hasil dari regresi *Fixed Effect Model*, berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa t hitung $>$ t kritis. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan untuk nilai probabilitas sebesar $0.0007 < 0.05$, maka dapat disimpulkan secara individu variabel Belanja Modal di kabupaten/kota Provinsi Jambi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

4.4 Interpretasi Hasil

Dari pemilihan model *comment effect*, *fixed effect*, dan *random effect* dengan menggunakan metode regresi data panel. Diperoleh hasil yaitu bahwa model yang tepat digunakan adalah *fixed effect model*.

Dari hasil regresi diperoleh persamaan:

$$\text{IPM} = 64.08998 + 0.0000000148 \text{ PDRB} + 0.000199 \text{ Jumlah Penduduk Miskin} - 0.000000129 \text{ APBD di Bidang Pendidikan} + 0.000000864 \text{ APBD di Bidang Kesehatan} + 0.000000473 \text{ Belanja Modal.}$$

4.4.1 Pengaruh PDRB terhadap IPM

Diperoleh nilai koefisien PDRB yaitu sebesar 0.0000000148 menunjukkan bahwa variabel PDRB di kabupaten/kota Jambi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Jambi. Maka artinya, ketika PDRB naik sebesar satu juta rupiah, maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik yaitu sebesar 0.0000000148 persen.

4.4.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap IPM

Diperoleh nilai koefisien jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 0.000199 menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Jambi tidak memiliki hubungan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Jambi. Maka artinya, ketika jumlah penduduk miskin naik sebesar seribu jiwa, maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik yaitu sebesar 0.000199 persen, namun tidak berpengaruh.

4.4.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan terhadap IPM

Diperoleh nilai koefisien APBD di Bidang Pendidikan yaitu sebesar - 0.000000129 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di kabupaten/kota Jambi tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Jambi. Maka artinya, ketika APBD di Bidang Pendidikan naik sebesar satu juta rupiah, maka Indeks Pembangunan Manusia akan turun yaitu sebesar 0.000000129 persen.

4.4.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan terhadap IPM

Diperoleh nilai koefisien APBD di Bidang Kesehatan yaitu sebesar 0.000000864 menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah untuk kesehatan di kabupaten/kota Jambi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Jambi. Maka artinya, ketika APBD di Bidang Kesehatan naik sebesar satu juta rupiah, maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik yaitu sebesar 0.000000864 persen.

4.4.5 Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM

Diperoleh nilai koefisien belanja modal yaitu sebesar 0.000000473 menunjukkan bahwa variabel belanja modal di kabupaten/kota Jambi berhubungan positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Jambi. Maka artinya, ketika belanja modal naik satu juta rupiah, maka Indeks Pembangunan Manusia naik yaitu sebesar 0.000000473 persen.

4.5 Analisis Ekonomi

4.5.1 Analisis Intersept

Pada tabel 4.5 menunjukkan konstanta masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2017.

Tabel 4.5
Hasil Cross Section Effect

No	Kabupaten/Kota	Konstanta	Koefisien	Intersept
1	Batanghari	0.537067	64.08998	64.627047
2	Bungo	0.831309	64.08998	64.921289
3	Merangin	1.659397	64.08998	65.749377
4	Kerinci	-0.836244	64.08998	63.253736
5	Muaro Jambi	-1.788820	64.08998	62.30116
6	Soralangun	0.426884	64.08998	64.516864
7	Tj.Jabung Barat	-5.092896	64.08998	58.997084
8	Tj.Jabung Timur	-8.103520	64.08998	55.98646
9	Tebo	-0.418368	64.08998	63.671612
10	Jambi	6.038598	64.08998	70.128578
11	Sungai Penuh	6.746593	64.08998	70.836573

Melalui tabel 4.5 tersebut dapat dilihat bahwa Kota Sungai Penuh dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi sebesar 70.836573, kemudian untuk Kabupaten/Kota yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia paling rendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 55.98646.

Tabel 4.6 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia yang mempunyai nilai tertinggi pada tahun 2017 sebesar 66.222115, sedangkan nilai terendah pada tahun 2010 sebesar 61.971507.

Tabel 4.6**Hasil Fixed Effect Period**

No	Tahun	Konstanta	Koefisien	Intersept
1	2010	-2.118473	64.08998	61.971507
2	2011	-1.606850	64.08998	62.48313
3	2012	-0.812585	64.08998	63.277395
4	2013	-0.212210	64.08998	63.87777
5	2014	0.073373	64.08998	64.163353
6	2015	0.869501	64.08998	64.959481
7	2016	1.675109	64.08998	65.765089
8	2017	2.132135	64.08998	66.222115

4.6 Pembahasan**4.6.1 Pengaruh PDRB Terhadap IPM Di Kabupaten/Kota Jambi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia juga sesuai dengan hipotesis. Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Muliza, 2017. Pada ekonomi modern salah satu penyebab tingginya output perkapita dikarenakan salah satu dari karakteristik pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan output yang dimaksud dalam hal ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)perkapita. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan output akan menyebabkan meningkatnya pola konsumsi masyarakat maka akan menyebabkan tingginya pola daya beli masyarakat. Meningkatnya daya beli masyarakat akan mempengaruhi peningkatan indeks pembangunan manusia, karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam pembentukan IPM dilihat dari segi pendapatan. Dapat disimpulkan semakin meningkatnya pertumbuhan

ekonomi maka akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

4.6.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Dengan IPM Di Kabupaten/Kota Jambi

Jumlah penduduk miskin menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, maka tidak sesuai dengan hipotesis yang telah ada. Penelitian ini sama seperti yang dilakukan oleh Nofrian Eka Putra, 2018. Dalam hal berarti semakin tingginya angka jumlah penduduk miskin maka akan menurunkan tingkat indeks pembangunan manusia. Program yang direncanakan pemerintah Jambi untuk menurunkan kemiskinan ternyata sampai tahun 2017 belum terbukti hanya tercapai kurang dari 50%. Jumlah penduduk miskin di Jambi tahun 2010 sekitar 260.500 jiwa jumlah penduduk miskin selama tujuh tahun terakhir meningkat 29.310 jiwa meningkat menjadi 11,25 persen. Kalau hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja maka tidak terlihat banyak perubahan dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin di Jambi yang hanya memiliki keahlian dalam bidang pertanian namun tidak memiliki lahan. Lahan pertanian masyarakat miskin di Jambi juga banyak berkurang akibat ekspansi perusahaan perkebunan dan industri, sebagian besar lahan dan hutan adat di Jambi juga sudah dikuasai pengusaha, sehingga masyarakat semakin sulit mendapatkan lahan. Akibat dari rendahnya suatu produktivitas maka akan menurunkan pendapatan yang mereka punya. Dari rendahnya pendapatan yang ada maka akan menurunnya tingkat investasi yang

mereka punya akibatnya terjadi keterbelakangan dan perbedaan kualitas sumber daya manusia.

4.6.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Dengan IPM Di Kabupaten/Kota Jambi

Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan menunjukkan tidak memiliki hubungan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil dari penelitian ini juga sama dari hasil yang diteliti oleh Astri Winarti, 2014. Tidak berpengaruhnya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap IPM dikarenakan masalah pendidikan masih menjadi persoalan di Provinsi Jambi. Mulai dari sarana dan prasarana pendidikan menjadikan pengaruh rendahnya mutu pendidikan di Jambi. sering terjadinya banjir yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana, bahkan pada tahun 2016 kerusakannya mencapai di atas 75%. Pengeluaran pemerintah sebanyak 20% tidak semuanya dialokasikan untuk pendidikan saja, namun dialokasikan untuk lainnya seperti gaji pegawai, pembenahan sarana dan prasarana, dana pendidikan lainnya. Sehingga dana yang diberikan oleh pemerintah tidak terlihat begitu signifikan setiap tahunnya dan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

4.6.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan Dengan IPM Di Kabupaten/Kota Jambi

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia. Adanya

hubungan yang positif dan signifikannya variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dengan indeks pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Jambi sesuai dengan teori dan hipotesis dalam penelitian ini. Anggaran dalam sektor kesehatan ini memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup yang sehat. Banyak masyarakat yang sudah menggunakan pelayanan kesehatan untuk berobat, sehingga akan menyebabkan meningkatnya angka kesejahteraan masyarakat dan hidup sehat di kabupaten/kota Provinsi Jambi. Hasil dari penelitian ini juga sama dengan yang diteliti oleh Dedi Pudja Wardana, 2016.

4.6.5 Pengaruh Belanja Modal Dengan IPM DI Kabupaten/Kota Jambi

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia. Adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel belanja modal dengan variabel indeks pembangunan manusia, dalam hal ini juga menunjukkan apabila rasio belanja modal yang dikeluarkan mengalami peningkatan 1%, maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Jambi. Hal ini juga sesuai dengan hipotesis peneliti adanya pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia.

Kaitan antar variabel ini juga berhubungan erat dengan apa yang di keluarkan biaya untuk pembangunan infrastruktur, dan lain-lain akan meningkatkan kualitas SDM. Jalan-jalan yang sudah diaspal, pembangunan jembatan, serta irigasi untuk mencegah terjadi banjir di kabupaten/kota Jambi. Provinsi Jambi rawan dengan banjir, sehingga dengan perbaikan sarana publik

maka akan membantu masyarakat dalam segala aktivitasnya. Seperti dalam pembangunan sarana prasarana yang akan mendukung perekonomian di kabupaten/kota Provinsi Jambi dan akan menghasilkan kualitas indeks pembangunan manusia yang baik. Penelitian ini juga memperoleh hasil yang sama dengan yang diteliti oleh Deni Sulistio Mirza, 2012.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan Analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari penjabaran yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa PDRB (X_1), jumlah penduduk miskin (X_2), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (X_3), pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (X_4), dan belanja modal (X_5) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (IPM). Artinya besar kecilnya IPM dipengaruhi oleh variabel PDRB, Jumlah Penduduk Miskin, pengeluaran pemerintah untuk Pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, dan Belanja Modal
2. Secara Parsial menunjukkan bahwa PDRB terbukti berpengaruh positif terhadap IPM, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan terbukti berpengaruh positif terhadap IPM, dan Belanja Modal terbukti berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan jumlah penduduk miskin terbukti tidak berpengaruh positif terhadap IPM dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terbukti tidak berpengaruh positif terhadap IPM.
3. Dilihat dari komponen yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita IPM kabupaten/kota Jambi termasuk dalam kategori sedang, daerah yang memiliki tingkat

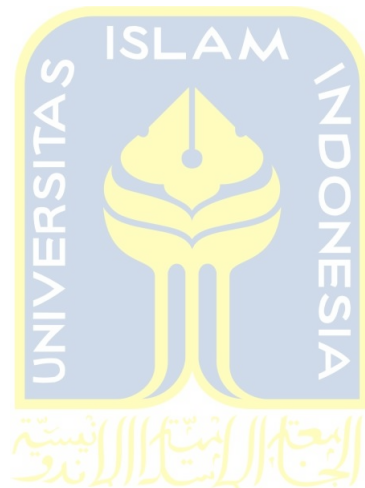
indeks pembangunan manusia antar kabupaten/kota Jambi dengan rata-rata IPM tertinggi selama tahun 2010-2017 adalah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Sungai Penuh dan yang terendah adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tebo.

5.2 Saran

1. Melihat pengaruh PDRB terhadap IPM di provinsi Jambi maka tidak mengurangi tingkat IPM. Maka Pemerintah harus lebih memperhatikan serta memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi yang digambarkan oleh PDRB dan Pendapatan daerah dalam membuat sebuah kebijakan dan pengalokasian agar IPM dapat terus meningkat.
2. Melihat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi, maka diharapkan pemerintah Provinsi Jambi dapat lebih meningkatkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Peningkatan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya menyediakan pelayanan dan fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang masih belum tersedia layanan kesehatan yang memadai serta terus melakukan pengawasan dan peningkatan terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut, melakukan penyuluhan-penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, mengadakan pengobatan-pengobatan gratis bagi masyarakat miskin.

3. Melihat besarnya pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi, maka diharapkan pemerintah Provinsi Jambi dapat lebih meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk belanja modal. Peningkatan pengeluaran pemerintah pada belanja modal dapat dilakukan dengan menambah lagi fasilitas publik khususnya jalan dan jembatan yang ada di plosok-plosok daerah. agar IPM di Provinsi Jambi dapat terus meningkat.
4. Melihat pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap IPM di Provinsi Jambi, diharapkan pemerintah Provinsi Jambi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin yang sekarang masih dalam jumlah yang cukup besar. Pengurangan angka jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi dapat dilakukan dengan beberapa hal antara lain membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan upah minimum regional di Provinsi Lampung, memberikan kemudahan dan fasilitas-fasilitas untuk berwirausaha kepada masyarakat miskin.
5. Melihat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi, diharapkan pemerintah Provinsi Jambi dapat memperbaiki dan meningkatkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan. Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dapat ditingkatkan dengan beberapa hal antara lain dengan memberikan bantuan-bantuan pendidikan berupa dana beasiswa kepada siswa kurang mampu ataupun siswa berprestasi, perbaikan gedung-gedung sekolah yang kurang layak di

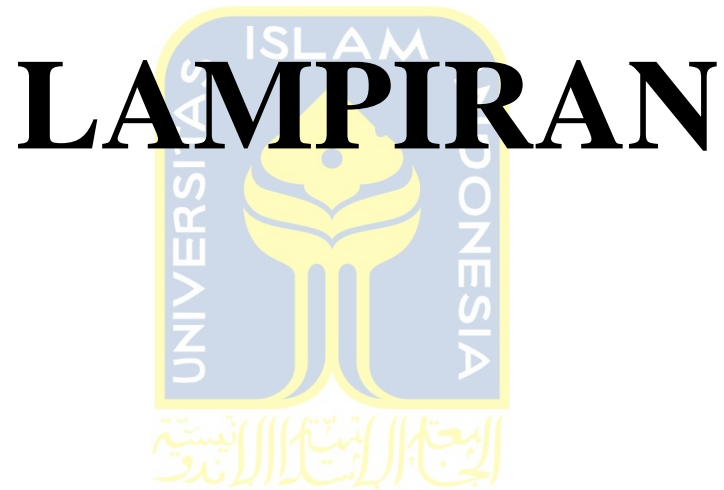
berbagai daerah, menambah fasilitas-fasilitas 83 pendidikan seperti buku-buku bacaan, kurikulum yang baik di setiap institusi pendidikan yang ada di Provinsi Jambi.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2010), *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik, (2010-2017), “Indeks Pembangunan Manusia”, Katalog Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia.
www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik, (2010-2017), Katalog Badan Pusat Statistik, Jambi.
<https://jambi.bps.go.id/>
- Bank Indonesia, (2018), “Produk Domestik Regional Bruto”
<https://www.bi.go.id/id/statistik/metadatas/sekda/Documents/8PDRBSEKD A1.pdf>
- Bhakti, N.A. (2012), “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 18, No. 4.
- Brata, A. G. (2004), *Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia*. Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (2010-2017), *Anggaran Pemerintah Belanja Daerah*.
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/visual/>
- Ghozali, Imam. (2005), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Harahap, R.U. (2011), “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Ekonomi* Vol. 11, No. 1.
- Hartini, N. T. (2017), “Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi DIY Tahun 2011-2015”. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* Vol. 6, No. 6.
- Heka, A. J. L, dkk. (2017), “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Berkala Ilmu Efisiensi* Vol. 17, No. 01.
- Jambi Independent, (2018), *Kemiskinan Batanghari masih Menjadi Soal*.
<http://jambi-independent.co.id>
- Kusmaningrum, R. A. (2018), “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah”, *Skripsi*

- Sarjana(Unpublished), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Melliana, Ayunanda dan Zain, Ismaini. (2013), “Analisis Statistika Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Menggunakan Regresi Panel”.*Jurnal Sains dan Seni* Vol. 2, No. 2.
- Mirza, D.S. (2012),“Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009”,*Economics Development Analysis Journal* Vol. 1, No. 1.
- Muliza, dkk. (2017), “Analisis Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM Di Provinsi Aceh”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol. 3, No. 1.
- Nordiawan, Deddi. (2006), *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat: Jakarta.
- Nurfadhli, Rizki. (2017), “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Pulau Sumatera Periode Tahun 2010-2015”. Skripsi Sarjana (Published), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Yogyakarta.
- Feriyanto,N. (2014), "Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Indonesia".UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Putra, Windhu (2018). *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, Jilid-1. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Putri, A. E. (2018), “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016”. Skripsi Sarjana (Unpublished), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Rifa'i, Ahmad. (2016), “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2013”. Skripsi Sarjana (Published), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sen, A. (1999), *Development as freedom*1st ed, Oxford University Pres.New York.
- Sumodiningrat, G. (2009), *JPS dan Pemberdayaan*, Jakarta: Gramedia
- Todaro. Michael P. (2000), “Pembangunan Ekonomi”, Jakarta: Bumi Aksara
- Todaro M.P dan Smith, S.C. (2003), *Economic Development*, Eight Edition. PT: Gelora Angkasa Pratama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Widarjono, Agus 2013. “*Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya : Disertai Panduan Eviews*”, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.



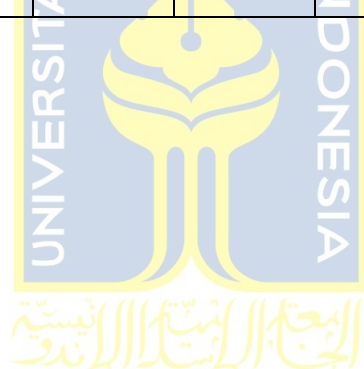
I. Data IPM Kabupaten/Kota Jambi Tahun 2010-2017 (%)

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Batanghari	65.67	66.32	66.97	67.24	67.68	68.05	68.70	68.92
Bungo	66.28	66.70	67.20	67.54	67.93	68.34	68.77	69.04
Merangin	63.85	64.40	65.31	65.82	66.21	67.15	67.86	68.30
Kerinci	65.16	65.85	66.71	67.49	67.96	68.89	69.68	70.03
Muaro Jambi	62.84	63.39	64.17	65.14	65.71	66.66	67.55	67.86
Soralangun	64.64	65.20	66.16	67.13	67.67	68.10	68.73	69.03
Tj.Jabung Barat	61.49	61.98	62.86	63.54	64.04	65.03	65.91	66.15
Tj.Jabung Timur	57.21	57.77	58.63	59.41	59.88	61.12	61.88	62.61
Tebo	63.62	64.45	65.23	65.91	66.63	67.29	68.05	68.16
Jambi	72.23	72.96	73.78	74.21	74.86	75.58	76.14	76.74
Sungai Penuh	69.91	70.55	71.23	72.09	72.48	73.03	73.35	73.75



II. Data PDRB Harga Konstana Kabupaten/Kota Jambi Tahun 2010-2017 (juta rupiah)

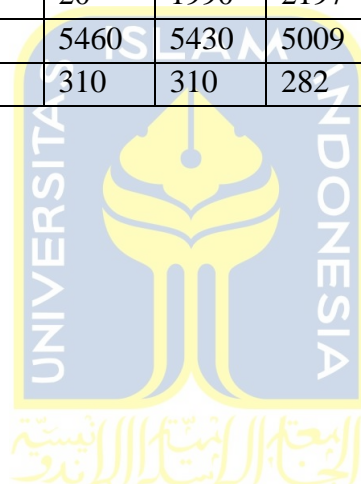
Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Batanghari	1192420	1286562	1378302	1472597	9298567	9695287	10136145	10624358
Bungo	1289286	1388316	1492587	1604287	9829561	10333808	10871038	11487950
Merangin	1183698	1266790	1348801	1435816	7583449	7992841	8490258	8961141
Kerinci	1121988	1185864	1263853	1345250	4811384	5120000	5463048	5792285
Muaro Jambi	1242110	1331270	1403046	1510928	12578253	13238011	13956192	14662154
Soralangun	1231626	1339988	1446947	1559394	8675187	8986677	9369339	9808849
Tj.Jabung Barat	2271966	2450202	2638387	2837573	24551689	25446121	26245198	27361787
Tj.Jabung Timur	2402966	2566987	2758000	2870848	15549497	15830522	16257802	16766264
Tebo	909755	971421	1036819	1104313	7881379	8302676	8747394	9236996
Jambi	3429619	3668601	3927353	4232248	15080230	15851958	16936442	17728339
Sungai Penuh	549710	586723	627368	670759	3460943	3705362	3946467	4192565



III. Data Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Jambi Tahun

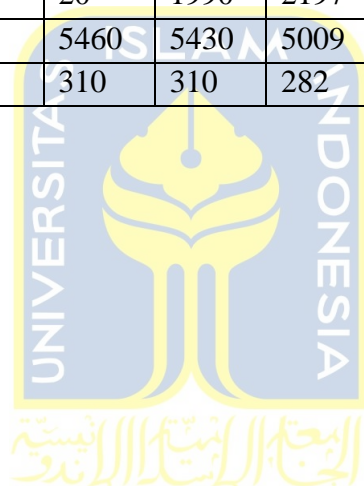
2010-2017 (ribu jiwa)

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Batanghari	2460	2560	2540	2652	2709	2810	2839	2749
Bungo	1730	18	1790	1735	1734	1952	2096	2081
Merangin	2730	2840	2820	3313	3390	3577	3689	3548
Kerinci	18	1810	1790	1715	1740	1915	1762	1762
Muaro Jambi	1820	1890	1880	1741	1741	1832	1752	1828
Soralangun	2390	2480	2470	2813	2783	2850	2637	2561
Tj.Jabung Barat	31	3230	3210	3487	3568	3910	3724	3633
Tj.Jabung Timur	2540	2640	2620	2831	2879	3018	2742	2722
Tebo	1920	20	1990	2197	2248	2357	2304	2318
Jambi	5260	5460	5430	5009	5096	5551	5161	5208
Sungai Penuh	3	310	310	282	288	298	275	246



**IV. Data Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan di
Kabupaten/Kota Jambi Tahun 2010-2017 (juta rupiah)**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Batanghari	2460	2560	2540	2652	2709	2810	2839	2749
Bungo	1730	18	1790	1735	1734	1952	2096	2081
Merangin	2730	2840	2820	3313	3390	3577	3689	3548
Kerinci	18	1810	1790	1715	1740	1915	1762	1762
Muaro Jambi	1820	1890	1880	1741	1741	1832	1752	1828
Soralangun	2390	2480	2470	2813	2783	2850	2637	2561
Tj.Jabung Barat	31	3230	3210	3487	3568	3910	3724	3633
Tj.Jabung Timur	2540	2640	2620	2831	2879	3018	2742	2722
Tebo	1920	20	1990	2197	2248	2357	2304	2318
Jambi	5260	5460	5430	5009	5096	5551	5161	5208
Sungai Penuh	3	310	310	282	288	298	275	246



V. Data Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan di

Kabupaten/Kota Jambi Tahun 2010-2017 (juta rupiah)

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Batanghari	56345	61334	69027	75739	82014	100553	368423	144332
Bungo	87729	78359	110083	134293	146643	162070	183029	238278
Merangin	44755	55767	60732	61825	89817	111868	164984	175250
Kerinci	45760	56671	66096	77628	83379	100313	18726	130324
Muaro Jambi	66914	63280	70590	77959	95852	109220	15279	127663
Soralangun	39115	45654	56804	65258	72944	86539	101364	91713
Tj.Jabung Barat	45076	63157	91521	113087	123158	139813	122614	62231
Tj.Jabung Timur	30886	21455	39036	52995	59740	64304	87180	98598
Tebo	37556	47237	45771	60355	64622	81723	107516	121926
Jambi	65030	82925	90383	115203	145694	152292	157479	246241
Sungai Penuh	18962	25191	23725	30811	38266	36048	43187	67271



VI. Data Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jambi Tahun 2010-2017

(juta rupiah)

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Batanghari	65209	106153	215647	255738	241655	156606	172177	206581
Bungo	175521	118712	103057	246894	195187	172423	110596	156057
Merangin	100981	177542	202789	212060	243001	291298	340726	301748
Kerinci	86651	172405	191926	199891	201494	177166	198781	216061
Muaro Jambi	109958	152508	245981	427129	336338	302531	268531	368236
Soralangun	100772	185875	219506	199497	228608	284426	233986	247349
Tj.Jabung Barat	172924	332153	271850	457744	598558	268727	225111	418013
Tj.Jabung Timur	332153	276884	317321	364242	339286	279110	365777	554437
Tebo	175310	162091	208663	271774	357652	245745	233969	233688
Jambi	58424	150862	248436	272722	296096	385128	424195	412969
Sungai Penuh	85023	141692	146503	192981	158048	177939	212004	173331



VII. Hasil Pengujian Likelihood Ratio Test

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	139.596039	(10,72)	0.0000
Cross-section Chi-square	265.316754	10	0.0000



VIII. Hasil Pengujian *HausmanTest*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

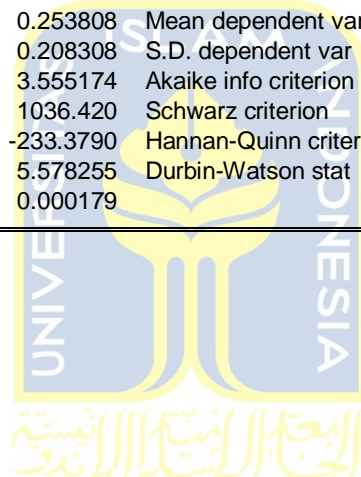
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	39.108277	5	0.0000



IX. Hasil Estimasi *Common Effect*

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/09/19 Time: 10:15
 Sample: 2010 2017
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 88

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.70891	1.197489	54.87224	0.0000
PDRB	1.18E-07	8.11E-08	1.459787	0.1482
PEND_MISKIN	0.000103	0.000357	0.286891	0.7749
APBD_PENDI	1.68E-05	5.69E-06	2.950483	0.0041
APBD_KES	-1.08E-05	1.35E-05	-0.798956	0.4266
BELAN_MODAL	-1.40E-05	4.67E-06	-2.992741	0.0037
R-squared	0.253808	Mean dependent var		67.09080
Adjusted R-squared	0.208308	S.D. dependent var		3.995608
S.E. of regression	3.555174	Akaike info criterion		5.440431
Sum squared resid	1036.420	Schwarz criterion		5.609340
Log likelihood	-233.3790	Hannan-Quinn criter.		5.508480
F-statistic	5.578255	Durbin-Watson stat		0.423694
Prob(F-statistic)	0.000179			



X. Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/09/19 Time: 10:17
 Sample: 2010 2017
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 88

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.08998	0.490042	130.7847	0.0000
PDRB	1.48E-07	2.05E-08	7.247531	0.0000
PEND_MISKIN	0.000199	0.000196	1.013089	0.3144
APBD_PENDI	-1.29E-06	1.55E-06	-0.836729	0.4055
APBD_KES	8.64E-06	3.94E-06	2.193925	0.0315
BELAN_MODAL	4.73E-06	1.33E-06	3.556900	0.0007

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.963401	Mean dependent var	67.09080
Adjusted R-squared	0.955776	S.D. dependent var	3.995608
S.E. of regression	0.840254	Akaike info criterion	2.652741
Sum squared resid	50.83394	Schwarz criterion	3.103166
Log likelihood	-100.7206	Hannan-Quinn criter.	2.834206
F-statistic	126.3512	Durbin-Watson stat	1.116232
Prob(F-statistic)	0.000000		

XI. Hasil Estimasi *Random Effect*

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/09/19 Time: 10:17
 Sample: 2010 2017
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 88
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.17321	0.761546	84.26703	0.0000
PDRB	1.45E-07	2.04E-08	7.134072	0.0000
PEND_MISKIN	0.000191	0.000185	1.030983	0.3056
APBD_PENDI	-7.35E-07	1.54E-06	-0.477844	0.6340
APBD_KES	8.45E-06	3.91E-06	2.158697	0.0338
BELAN_MODAL	3.97E-06	1.32E-06	3.006812	0.0035
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			1.993418	0.8491
Idiosyncratic random			0.840254	0.1509
Weighted Statistics				
R-squared	0.629713	Mean dependent var		9.889180
Adjusted R-squared	0.607135	S.D. dependent var		1.595194
S.E. of regression	0.999851	Sum squared resid		81.97557
F-statistic	27.89001	Durbin-Watson stat		0.670331
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.055276	Mean dependent var		67.09080
Sum squared resid	1465.720	Durbin-Watson stat		0.037491